

BAB II
KONDISI SOSIAL, KEAGAMAAN,
INTELEKTUAL DAN POLITIK DI ACEH
MENJELANG BERDIRINYA JAMI'AH ALMUSLIM

Pembicaraan mengenai berdirinya Jami'ah Almuslim mesti didahului dengan catatan-catatan tentang konfigurasi sosial, keagamaan, Intelektual dan politik di Aceh. Hal ini tidak lain karena eksistensi Jami'ah Almuslim sendiri dan kegiatan-kegiatannya seringkali dirumuskan dalam konteks merespon kondisi yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial, keagamaan, intelektual dan politik tersebut.

A. Kondisi Sosial

Aceh sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah berdaulat dengan bentuk pemerintahan kesultanan. Berawal dari kesultanan Pereulak yang didirikan pada tahun 840 H, kemudian kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada tahun 1264. Portugis menghancurkan kesultanan Pasai pada tahun 1514 dan sejak itulah mereka menduduki Pasai. Namun Sultan Ali al-Mughayat Syah (1507-1522), dari kesultanan Aceh Darussalam, mampu mengusir Portugis dari bumi Pasai dalam tahun yang sama, maka semenjak itu wilayah kesultanan Pasai jatuh ke tangan kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam baru dihancurkan Belanda pada tahun 1912. Bekas wilayah kesultanan Pereulak, kesultanan Pasai dan kesultanan Aceh Darussalam itulah yang menjadi Provinsi Aceh sekarang.¹

Aceh terletak paling Barat dari kepulauan Nusantara, tepatnya di ujung Barat laut pulau Sumatera antara 2-65° lintang Utara dan 95-98° bujur Timur dan letaknya sangat strategis pada jalur pelayaran dan penerbangan Internasional. Posisi geografisnya adalah: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, (3) Sebelah Barat

¹ Bandingkan dengan Abd. Mukti, *Revitalisasi Kode Etik Guru menuju Pembentukan Masyarakat Aceh yang Berperadaban* (Makalah, tidak diterbitkan, 2010), h. 2-3.

berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Luas wilayah Aceh adalah 57.365,57 km² atau 5.736.557 Ha. Keseluruhan wilayah tersebut terdiri dari hutan, areal pertanian, padang rumput, rawa-rawa, kota, gampong, danau, sungai, bukit, dan pergunungan.²

Berdasarkan sensus pada tahun 1930, penduduk Aceh berjumlah 1.003.062 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 3,2 persen per-tahun. Pada tahun 1961 penduduk Aceh tercatat 1.628.983 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 1,6 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk selama periode ini, antara lain disebabkan kondisi keamanan di Aceh yang tidak stabil, terutama setelah pendudukan Jepang serta terjadinya pergolakan di daerah ini pada awal kemerdekaan dan pada tahun 1950-an yang terkenal dengan peristiwa DI-TII. Sensus penduduk pada tahun 1971 penduduk Aceh tercatat 2.008.595 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,14 persen per-tahun. Pada tahun 1980 jumlahnya meningkat menjadi 2.610.926 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,93 persen per-tahun. Sedangkan pada tahun 1990 jumlah penduduk Aceh sebanyak 3.415.875 jiwa yang terdiri dari 1.717.032 jiwa laki-laki dan 1.698.843 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan 2,72 persen. Pada tahun 2000 penduduk Aceh berjumlah 4.073.000 jiwa.³

² Mulyadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan; Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, cet. 1 (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2009), h. 1.

³ Laporan Badan Pusat Statistik Aceh, bahwa Penduduk Aceh dari tahun 2000 sampai tahun 2010 sebagai berikut: tahun 2000 berjumlah 4.073.000 jiwa, terdiri dari 2.042.300 laki-laki dan 2.030.700 perempuan dengan tingkat pertumbuhan -0,90 %. Tahun 2001 berjumlah 4.142.100 jiwa, terdiri dari 2.074.500 laki-laki dan 2.067.600 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 1,70 %. Tahun 2002 berjumlah 4.166.200 jiwa, terdiri dari 2.090.300 laki-laki dan 2.075.900 perempuan dengan tingkat pertumbuhan -0,58 %. Tahun 2003 berjumlah 4.218.500 jiwa, terdiri dari 2.119.600 laki-laki dan 2.098.900 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 1,26 %. Tahun 2004 berjumlah 4.075.500 jiwa, terdiri dari 2.031.800 laki-laki dan 2.043.700 perempuan dengan tingkat pertumbuhan -3,39 %. Tahun 2005 berjumlah 4.031.600 jiwa, terdiri dari 2.005.800 laki-laki dan 2.025.800 perempuan dengan tingkat pertumbuhan -1,08 %. Tahun 2006 berjumlah 4.153.600 jiwa, terdiri dari 2.066.200 laki-laki dan 2.087.400 perempuan dengan tingkat pertumbuhan -0,90 % dengan tingkat pertumbuhan 3,03 %. Tahun 2007 berjumlah 4.223.840 jiwa, terdiri dari 2.101.420 laki-laki dan 2.122.420 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 1,69 %. Tahun 2008 berjumlah 4.293.920 jiwa, terdiri dari 2.136.060 laki-laki dan 2.157.860 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 1,66 %. Tahun 2009 berjumlah 4.363.480 jiwa, terdiri dari 2.171.390 laki-laki dan 2.192.090 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 1,62 %. Tahun 2010 berjumlah 4.494.410 jiwa, terdiri dari 2.248.950 laki-laki dan 2.245.460 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 3,00 %. Baca lebih lanjut dalam Syech Suhaimi, "Penduduk Aceh Lebih banyak laki-laki" dalam *Serambi Indonesia* (Jum'at 6 Mai 2011), h. 24.

Daerah Aceh termasuk wilayah tropis dengan musim kemarau tiap tahunnya berkisar antara bulan Maret sampai Agustus, dan musim penghujan berkisar antara bulan September sampai Pebruari. Curah hujan berkisar antara 1.000 mm sampai 2.000 mm di pesisir Utara dan Timur serta 2.000 mm sampai 3.000 mm di bahagian pedalaman dan sekitar 3.000 mm di bahagian pesisir Barat Selatan. Dengan demikian curah hujan tidak merata di seluruh Aceh, di mana pesisir Barat dan Selatan menerima curah hujan yang paling banyak.⁴ Di daerah-daerah pesisir Aceh pada umumnya berhawa panas dengan suhu berkisar antara 25-30° c dan di daerah-daerah pedalaman (daratan tinggi) berhawa sejuk atau dingin dengan temperatur rata-rata 20° c. Secara keseluruhan temperatur maksimum rata-rata sepanjang tahun antara 23-25° c dengan kelembaban nisbi berkisar antara 65 sampai 75 persen.

Kepulauan Nusantara dan semenanjung tanah Melayu sepanjang sejarah merupakan wilayah-wilayah yang sangat strategis, oleh karena terletak antara lautan Hindia dan laut Cina selatan yang menghubungkan negeri-negeri sebelah timur, seperti Cina, dan Jepang, dengan negeri-negeri sebelah barat, yaitu anak benua India, Parsi dan negara-negara Arab, Afrika, serta Benua Eropa. Kepulauan Nusantara menghasilkan rempah-rempah dan hasil-hasil bumi lainnya yang amat diminati oleh pedagang-pedagang dari timur dan barat. Di Selat Malaka, misalnya muncullah pelabuhan-pelabuhan *transito* tempat para pedagang dari segenap penjuru bersama kapalnya bertemu, mengadakan transaksi perdagangan, sambil menunggu giliran datangnya angin musim timur-laut dan barat-daya yang akan membawa mereka bersama barang-barang dagangannya ke tempat tujuan masing-masing.⁵

Menurut Harry Kawilarang, pengaruh Aceh pada abad ke-18 sampai awal abad ke-19 sangat kuat di seputar Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, karena Aceh menguasai jaringan niaga lada sejak

⁴ Kurdi, *Aceh di Mata*, h. 1.

⁵ Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), h. 1.

lama. Pada tahun 1820, Aceh adalah produsen lada hitam terbesar di dunia⁶ dan telah menjadi pusat perdagangan internasional yang salah satu ekspor utamanya adalah lada. Pedagang-pedagang dari anak benua India terdiri dari orang-orang Gujarat, Benggala, dan Keling serta pedagang-pedagang dari Peru, Siam, dan Kedah menjalankan kegiatan perdagangan di Selat Malaka, yang sebagian berdagang di wilayah Pasai, sebagian lagi di Aceh wilayah Pidie dan selebihnya menjalankan perdagangan di Selat Malaka. Hubungan perdagangan antara Pasai dan Jawa berkembang dengan pesatnya. Di Samudra Pasai pedagang-pedagang Jawa mendapat hak istimewa, yakni dibebaskannya mereka dari bea cukai impor dan ekspor atas barang-barang perdagangan yang dibawa mereka.⁷

Tome Pires memperkirakan bahwa Aceh mengeksport lada kira-kira 8.000 sampai 10.000 bahar setiap tahun, atau 15.000 bahar jika terjadi panen yang melimpah. Di samping mengeksport lada, Aceh juga mengeksport sutra, kapur barus, dan emas dari daerah-daerah pedalaman. Dipercayai bahwa metode memeroses sutra diperkenalkan di Aceh oleh orang-orang Cina.⁸ Giovanni da Empoli memberikan informasi bahwa kerajaan Aceh berjanji akan memberikan sutra kepada orang-orang Portugis untuk diekspor; sebelum itu Aceh memasok sutra kepada pedagang-pedangan Gujarat yang kemudian menukarkan sutra itu dengan berbagai bahan dari Cambay India dan barang-barang dagangan lainnya yang berharga 100.000 dukat.⁹

Pada awal akhir abad ke-18 kerajaan Aceh telah menukil sejarah baru dalam peta perdagangan dunia, yaitu dengan memperkenalkan pedagang Inggris dan Belanda untuk membeli lada di wilayah kekuasaannya secara bebas, walaupun kerjasama dagang antara kedua negara tersebut telah terjalin lama.¹⁰ Di

⁶ Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010), h. 30.

⁷ *Ibid.*, h. 2.

⁸ M.A.P. Meilink Roelofs, *Asian Trade and European Influence in The Indonesian Archipelago between 1500 and 1630* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962), h. 90.

⁹ *Ibid.*, h. 350.

¹⁰ Kontak pertama antara orang-orang Belanda dengan kerajaan Aceh terjadi pada tanggal 21 Juni 1599, ketika sebuah kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederick de Houtman tiba di pelabuhan Aceh dengan dua buah kapal *de Leeuw* dan *de*

samping itu Sultan juga memperkenankan orang Portugis berada di Aceh Darussalam sebagai tenaga ahli.¹¹ Konsep perdagangan kemitraan antara kerajaan Aceh dengan Belanda tidak selalu terjalin dengan baik. Dua kapal Belanda di bawah pimpinan Admiral Paulus van Caerden menelusuri pantai Barat Sumatra dan sampai di pelabuhan Aceh. Ia telah melakukan kecorobohan dengan merampok kapal Aceh dan memungghah semua lada yang terdapat dalam kapal Aceh itu, menenggelamkannya, dan kemudian mereka melarikan diri. Akibat dari kejadian ini hubungan perdagangan antara Aceh, Belanda dan Inggris mengalami masa-masa suram, walaupun pada tahun 1824 dicapai suatu kesepakatan antara Aceh, Belanda dan Inggris yang terkenal dengan Perjanjian London (*Treaty of London*). Dalam sebuah Nota yang dilampirkan pada Traktat itu dinyatakan bahwa tindakan permusuhan tidak akan dilakukan terhadap kerajaan Aceh.¹² Meskipun demikian dalam perjalanan sejarah setelah 1824, sejumlah komplik antara Belanda dengan kerajaan Aceh tidak dapat dihindari. Pada tahun 1829 Belanda menyerang Barus yang dikuasai Aceh. Serangan Belanda dapat dipatahkan oleh pasukan-pasukan kerajaan Aceh. Pada tahun 1835 beberapa perahu Aceh di sekitar Pulau Poncang, teluk Tapanuli, ditahan oleh pihak Belanda. Awak perahunya sebagian ditangkap, sedangkan sebagian lagi dibunuh.¹³ Walaupun insiden-insiden kecil sering terjadi antara kerajaan Aceh dengan Belanda, namun pihak Belanda pada mulanya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Aceh, karena terikat perjanjian *Traktat London* tahun 1824 yang mengharuskan Belanda menghormati kedaulatan kerajaan Aceh. Beberapa puluh tahun kemudian Belanda berhasil membawa Inggris ke Meja perundingan hingga akhirnya tercapailah perjanjian 1871 yang terkenal dengan *Traktat Sumatra*.

Leeuwin. de Houtman menghadap sultan dengan membawa bingkisan dan mohon izin Sultan agar memperkenankan berdagang di Kerajaan Aceh. Pihak Istana Aceh juga membalas bingkisan de Houtman dengan hadiah dari Sultan Aceh dan mereka diperkenankan berdagang di Aceh. Baca: *Ibid*, h. 67.

¹¹ *Ibid*.

¹² Lihat *Traktat London* beserta lampirannya dalam E.B.Kielstra, *Beschrijving van Atjeh Oorlog: met Gebruikmaking der Officieele Bronnen* (Afgestaan: Departement van Kolonien Daartoe Jil. I, 1883), Lampiran I, h. 390.

¹³ G.B. Hooyer, *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch Indie van 1811 to 1894* cet. 1 (Nederlandsch: t.p, 1897), Jilid III, h. 25.

Dalam *Traktat* ini antara lain dinyatakan, bahwa Belanda bebas untuk memperluas kekuasaannya di seluruh pulau Sumatra sehingga dengan demikian tiada kewajiban bagi Belanda untuk menghormati kedaulatan kerajaan Aceh sesuai dengan isi Traktat London.¹⁴

Tahun 1873 merupakan babak baru dalam kehidupan sosial Aceh, yaitu masuknya Aceh ke dalam kancah peperangan dengan Belanda, sebagai akibat dari perjanjian Sumatra (*Traktat Sumatra*) pada tahun 1871, maka pada tanggal 5 April 1873 Belanda siap di Perairan Aceh dengan enam kapal uap, dua kapal angkatan laut, lima kapal penumpang dan lima kapal layar. Pada tanggal 08 April 1873 mendaratlah pasukannya di Pandai Kuta Perwira Ceureumen, sebelah timur Ulee Lheue, dengan kekuatan 168 orang perwira serta 3.198 bawahan di bawah pimpinan Mayor Jendral J.H.R. Kohler.

Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 sampai dengan 1912, tentu telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun bidang-bidang lainnya. Sejak tahun 1874 situasi kesehatan masyarakat terus-menerus berada dalam kondisi tidak mengembirakan, dan mencapai puncaknya pada tahun 1901. Demam, biri-biri, kolera, sakit perut dan cacar menyerang masyarakat Aceh. Hewan ternak juga ditimpa penyakit seperti pes sapi, demam Texas, lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengakibatkan hewan-hewan ternak mati.¹⁵

Untuk mengantisipasi keadaan kesehatan masyarakat Aceh yang semakin hari semakin parah, pada tanggal 01 Juli 1908 pemerintah Hindia Belanda mendirikan poliklinik pribumi di Peunayong, kemudian seiring dengan perkembangan kesehatan masyarakat, klinik-klinik kesehatan lainnya terus didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Aceh, sehingga sampai tahun 1942 Belanda telah mendirikan 80 klinik kesehatan di

¹⁴ Alfian, *Wajah*, h. 75.

¹⁵ Munawir, *Birokrasi Kolonial Di Aceh 1003-1942* (Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2007), h. 117.

seluruh Aceh. Sedangkan rumah sakit besar (rumah sakit rujukan) hanya ada di Kuta Raja (Banda Aceh sekarang).¹⁶

Di samping pelayanan kesehatan, Pemerintah Hindia Belanda juga melakukan pembangunan transportasi dan komunikasi di Aceh sejak tahun 1876. Dalam rangka menaklukkan Aceh, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu memperhatikan jaringan jalan yang bermanfaat untuk aksi militer. Pada awalnya jalan yang dibuka tanpa mengikuti sistem tertentu.¹⁷ Dalam setiap pembukaan jalan saat itu lebih diutamakan untuk kepentingan militer, di samping kepentingan ekonomi. Mulai tahun 1901 Gubernur Sipil dan Militer Aceh Van Heutz telah mulai membangun rel kereta api, sehingga pada tahun 1914, kereta api telah dapat mengangkut hampir tiga juta orang di Aceh. Di samping rel kereta api juga telah dilakukan pelebaran dan penambahan pembangunan jalan raya yang memuluskan dalam melakukan transportasi Aceh. Sampai tahun 1930-an sudah terdapat 1.500 kendaraan yang terdiri dari 756 kendaraan pribadi, 427 bus dan 258 truk.¹⁸ Pembangunan bidang transportasi ini, dalam proses spesifikasi daerah Aceh, Belanda menganggap penting, baik dari sudut pandang politik, militer dan ekonomi. Di samping itu, pemerintah Hindia Belanda juga telah melakukan berbagai pembangunan ekonomi lainnya.

Menurut Swart, pembangunan ini terus digalakkan oleh Belanda dengan harapan bahwa rakyat Aceh tidak lagi memusuhi Belanda, serta akan melupakan penderitaan yang dialaminya akibat perbuatan pemerintah Belanda dalam bentuk penindasan yang sangat menyakitkan hati dan merugikan rakyat Aceh yang telah berlangsung sekian lama.¹⁹

Pada tahun 1928 areal persawahan yang telah dibangun oleh Pemerintah Van Heutz di Aceh seluas 130.000 ha. Dengan hasil produksinya telah surplus beras, oleh Pemerintah telah diusahakan untuk diekspor ke daerah-daerah Sumatra

¹⁶ *Ibid.*, h.119-120.

¹⁷ A.J. Vleer, "De Positie van de in het Toeha Peut in het Atjehsche Staatsbestel" dalam *Koloniaal Studien*, Nomor 6 tahun ke-19, Desember 1935, h. 150.

¹⁸ J. Jonggesjans, *Land en Volk van Atjeh; Vroeger en Nu* (Hollandia Drukkerij: Baan, 1937), h. 240-241.

¹⁹ H.N.A. Swart, *Memorie van Overgave van Atjeh en Onderhorigheden* (Den Haag: Agustus, 1918), h. 73.

Timur sebagai bahan konsumsi karyawan-karyawan pada perkebunan yang berada di sana.²⁰ Selain peningkatan usaha hasil produksi juga dilakukan peningkatan peremajaan pohon-pohon rakyat, seperti kelapa, pinang, dan lada, dan untuk menunjang usaha ini pemerintah memberikan pinjaman modal kepada rakyat yang menginginkan, tanpa dikenakan bunga, melalui bank-bank kecil yang khusus didirikan untuk menunjang usaha-usaha pertanian rakyat. Di wilayah Aceh Besar dalam tahun 1916 telah didirikan 5 bank kecil, sementara di Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Timur sejak tahun 1913 juga telah didirikan masing-masing satu bank. Dalam tahun 1918 jumlah bank yang didirikan telah meningkat menjadi 29 unit.²¹ Sebagai akibat dari bantuan dan kemudahan yang diberikan bank-bank ini terhadap perkebunan lada, maka pada tahun 1919 Aceh telah mampu mengespor lada sebanyak 4.340.000 kg. Lada hitam dan 1.000.000 kg lada putih.²² Di samping perkebunan lada, Pemerintah Hindia Belanda juga telah memperkenalkan perkebunan karet modern di Aceh sejak tahun 1908 seperti, *Soengei Lipoet Cultuur Maatschappij*, didirikan pada bulan Pebruari 1098, dengan modal £.750.000 dan luas 1.500 ha. Pada tahun 1908 didirikan pula perkebunan karet *Rubber Cultuur Maatshappij*, luas 14.184 ha, dengan modal £. 2.000.000. Pada bulan Juni 1910 didirikan perkebunan karet, *Langsar Sumatra Rubber Maatschappij* dengan modal £.1.500.00, pada bulan Januari 1911 didirikan perkebunan karet, *Batang Ara Cultuur Mij*, dengan modal £.500.000.²³ Sampai tahun 1923 jumlah perkebunan ini di seluruh Aceh mencapai 20 buah.

Keberhasilan Belanda dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik transportasi, komonikasi, perkebunan, perbankan, dan perekonomian di Aceh mulai tahun 1901,²⁴ menyebabkan timbulnya kebutuhan akan tenaga kerja

²⁰ Rusdi Sufi, *Pernak-Pernik Sejarah Aceh* (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2009), h. 78.

²¹ *Ibid.*, h. 79.

²² K.A. James, "De Pepercultuur ter Oostkust van Atjeh", *Koloniale Studien* (Weltevreden: G. Koe & Co, 1922), h. 375.

²³ J. Langhout, *Economosche Staatkunde in Atjeh* (Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon, 1923), h. 84.

²⁴ Sufi, *Pernak Pernik*, h. 76.

terampil. Tenaga kerja tersebut tidak dapat dihasilkan, kecuali setelah mendapatkan pendidikan. Karena itu Belanda mendirikan sekolah di berbagai daerah di Aceh. Sekolah pertama yang didirikan Belanda di Aceh adalah *Volk School* (sekolah desa) pada tanggal 30 Desember 1907 di Aceh Besar dengan murid perdana 30 orang yang diprakarsai oleh Gubernur Sipil dan Militer Van Daalen.²⁵ Pada tanggal 1 Mei 1910 Belanda mendirikan sekolah khusus perempuan (*Maisje Scholen*) di Ulee Lheue, tahun 1915 didirikan *Hollands Inlandse School* (HIS), pada tahun 1920 didirikan pula *Meer Unitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Kuta Raja.²⁶ Dalam kenyataannya sekolah Belanda tersebut sangat diskriminatif terhadap masyarakat pribumi, tidak semua masyarakat Aceh mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan Belanda tersebut. Pembangunan pendidikan Barat di Aceh pada dasarnya didasari pada pertimbangan ekonomi, karena pada awal abad ke-20 banyak perusahaan-perusahaan Belanda dan yang berkolaborasi dengan Belanda didirikan di Aceh semakin membutuhkan pekerja-pekerja terampil. Banyak pegawai yang direkrut dari bumi putera dijadikan sebagai aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Untuk kepentingan inilah mereka mengembangkan sistem pendidikan kepada kalangan penduduk bumi putera. Penyelenggaraan sistem pendidikan kolonial di Aceh dilaksanakan penuh dengan diskriminatif, artinya tidak semua masyarakat Aceh mendapat tempat yang sama dalam memperoleh pendidikan Belanda. Sebagai respon terhadap kenyataan ini,

²⁵ Sejarah Aceh mulai tahun 1907 dapat dianggap menarik, karena di samping masih berperang melawan Belanda, sebageian masyarakat Aceh sudah berkenalan dengan salah satu unsur Kebudayaan Barat, yaitu pendidikan modern yang dipaksakan dari luar. Akibat kontak kebudayaan ini timbullah perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat Aceh, terutama pendidikan, akibat dari kontak kebudayaan ini serta dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, maka sebageian ulama Aceh terinspirasi untuk melakukan pembaruan pendidikan pribumi di Aceh dari lembaga pendidikan *meunasah*, *rangrang* dan *dayah* menjadi *madrassa*. Baca lebih jelas: Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Banda Aceh, 1999), h. 191 dan 195. Menurut Teuku Ibrahim Alfian ini merupakan sebuah penemuan. Penemuan adalah penting bagi suatu perubahan sosial. Penemuan tidak selamanya bersifat kebendaan, beberapa di antaranya dapat juga merupakan iea-idea. Tentang hal ini, lihat: William F. Ogburn, "Sosial Change", *Encyclopaedia of Sosial Sciences* (New York: Macmillan, 1959), h. 313.

²⁶ Warul Walidin, *Dinamika Pemikiran Pendidikan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 114-115.

sejumlah ulama mengambil inisiatif untuk merekonstruksi lembaga pendidikan tradisional di Aceh ke sistem madrasah yang modern. Inilah kondisi sosial di Aceh menjelang didirikannya Jami'ah Almuslim pada tahun 1929.

B. Kondisi Keagamaan

Agama dalam kehidupan bermasyarakat berperan sebagai sarana pemersatu dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai kondisi dan situasi yang terjadi di sekelilingnya. Secara sosiologi, agama merupakan kategori sosial dan tidak empiris. Dalam konsteks ini, agama dirumuskan dalam tiga corak pengungkapan universal berupa pengungkapan teoritis berwujud sistem kepercayaan (*belief system*), pengungkapan praktis sebagai sistem persembahan (*system of worship*), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat (*system of sosial relation*).²⁷ Di sini agama secara teoritis merupakan sistem yang mempunyai daya bentuk sangat kuat dalam membangun ikatan sosial religius masyarakat. Bahkan agama mampu membentuk kategori sosial yang teroganisir atas dasar ikatan psiko-religius, kredo, dogma atau tata nilai spiritual yang diyakini bersama.²⁸ Dengan demikian, agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan hidup masyarakat Aceh.²⁹

Setting sosial keagamaan³⁰ di Aceh pada abad ke-18 masih sangat

²⁷ Ahmad Syafe'i (ed.), *Penelitian Pengembangan Agama Menjelang Awal Milenium 3*, cet.1 (Jakarta: Badan Litbang Agama, 1999), h. 2.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Aceh sebelum kedatangan Islam merupakan wilayah kerajaan Hindu/Budha yang penduduknya menganut agama Hindu, Budha dan *Animisme (perbegu)*. Baca: Ali Hasjimy, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 54.

³⁰ Fakta sejarah memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh sudah bersentuhan dengan Islam sejak abad pertama Hijriyah/ketujuh Masehi atau kedelapan Masehi, sebagaimana dikatakan oleh Arnold, atau paling tidak masyarakat Aceh sudah bersentuhan dengan Islam pada abad ketigabelas Masehi, sebagaimana yang di sampaikan oleh Marrison. Akan tetapi kebanyakan para peneliti cenderung mengatakan bahwa sangat memungkinkan Islam sudah diperkenalkan ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah/ketujuh Masehi, tetapi hanyalah setelah abad kedubelas pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Baca: N.A. Baloch, *Adven of Islam in Indonesia*, Edisi I (Islamabad: Islamabad National Institute Historical and Cultural Research, 1980), h. 56-7. Menyangkut dengan daerah mana yang mula-mula menerima kedatangan Islam di Aceh juga masih terjadi perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa Perlak adalah daerah pertama yang menerima kedatangan Islam di Aceh. Sebagian ilmuan sejarah lainnya berpendapat bahwa daerah Aceh yang mula-mula menerima Islam adalah Pasai, pantai utara Aceh. Baca: Abd. Mukti, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia" dalam *Analytica Islamica*, vol. IV, h. 15-16.

diwarnai dan dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya, terutama masa Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636),³¹ karena pada masa ini Aceh mencapai puncak kejayaannya di berbagai bidang. Dakwah Islam pada periode ini sangat gencar dilakukan, baik di berbagai pelosok Aceh sendiri, maupun ke luar Aceh.³² Pelaksanaan ajaran Islam bukan hanya dalam bidang amar ma'ruf tetapi juga dalam bidang nahi munkar. Karena itu, di Aceh pada ketika itu, telah dikenal pengadilan yang berdasarkan agama yang dipegang oleh *Qâdî al-Mâlik al-'Âdil*. Pengadilan ini mulai di tingkat pusat kerajaan, sampai ke mukim-mukim di mana *Uleebalang* sebagai pimpinan wilayahnya.³³ Islam telah memiliki kekuatan politik ketika banyak pimpinan wilayah di berbagai pelosok Aceh memeluk agama Islam ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (sunni) dan menjadikan Islam ajaran *sunni* sebagai ideologi negara sehingga *intervensi* negara berjalan dengan lancar. Ajaran Islam dapat dilaksanakan sebagai hukum-hukum publik dan *privat*. Bahkan mulai menjadi norma yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat dan hukum yang hidup (*living law*) dan memiliki keterkaitan *sosiologis sakralitas* bagi masyarakat Aceh.³⁴ Proses Islamisasi di berbagai bidang kehidupan tersebut telah membuat rakyat Aceh seluruhnya beragama Islam, mereka terkenal patuh dan taat kepada agamanya. Islam telah berabad-abad menjadi agama rakyat. Banyak unsur-unsur Islam terdapat dalam adat istiadat mereka, dalam bahasa, kesenian, tata cara berpakaian, cara perkawinan, dalam hukum pewarisan, kekerabatan dan dalam kehidupan sosial lainnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa agama rakyat tergantung kepada agama

³¹ Pada masa kerajaan Aceh Darussalam ini hidup empat ulama besar dan terkenal di Nusantara, yakni Syekh Hamzah Fansûriy (wafat sebelum tahun 1016/1607), Syekh Syams al-Dîn al-Sumathraniy (w. 1630), Syekh Nur al-Dîn al-Rânîry (w. 1068/1658) dan Syekh Abd al-Râuf al-Singkîly (1024/1615-1105/1693).³¹ Sejalan itu, kerajaan Aceh juga terkenal sebagai Dinasti yang pertama kali mengeluarkan mata uang emas di wilayah Asia Tenggara yang beridintitaskan Islam yang dinamakan dengan *dirham*. Saat itu kerajaan diperintahkan oleh Sultan Mâlik Zhâhir (w. 1326). Baca: Abd. Mukti, *Sejarah Pertumbuhan*, h. 25.

³² M. Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Serambi Makkah*, cet. 1 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), h. 21.

³³ Ismuha, "Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Aceh, dahulu, sekarang dan nanti" dalam Ismail Sunny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, cet.1 (Jakarta: Bhratara, 1981), h. 232.

³⁴ H.M. Thamrin Z dan Edy Mulyana, *Perang Kemerdekaan Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007), h. 21.

rajanya berlaku juga pada masyarakat Aceh. Mereka menganut ajaran yang dianut oleh para sultan mereka, yaitu ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (sunni), yakni mazhab Syâfi'i dalam fiqh dan aliran Asy'ârîyah dalam teologi. Ini berarti bahwa para sultan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran Sunni tersebut melalui pendidikan. Untuk itu para sultan mendirikan *muenasah* pada setiap desa (*gampong/huta*) untuk mengajarkan ajaran-ajaran Sunni tersebut di bawah pimpinan *Imum meunasah*. Hal ini telah dimulai oleh sultan-sultan Pasai sebelumnya dan kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan Aceh Darussalam. Bahkan yang terakhir ini menyebarkan sistem pendidikan *Meunasah* di seluruh Aceh dan daerah-daerah lain yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan ajaran Islam versi Sunni benar-benar telah menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh.³⁵ Muslim Ibrahim mengatakan bahwa syari'at Islam pada masa itu telah dilaksanakan secara *kaffah* di Aceh yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Wilayah kerajaan Aceh pada waktu itu meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sumber sejarah menyebutkan bahwa, seluruh tatacara kehidupan baik yang berhubungan dengan hukum kemasyarakatan maupun hukum tata negara, semuanya telah diatur dalam *Adat Meukuta Alam* yang ditulis dalam huruf Jawi (Arab Melayu), sekaligus ditetapkan sebagai Undang-Undang Kerajaan. *Adat Meukuta Alam* juga dijadikan pedoman oleh sejumlah kerajaan lain di Semenanjung, seperti Pahang, Perak, Kelantan, Phattani, dan Malaka.³⁶

Adat Meukuta Alam tidak hanya digunakan di daerah Semenanjung saja, melainkan juga digunakan oleh Sultan Hasan sebagai pemimpin kerajaan Brunai Darussalam pada waktu itu. Ini tercermin dari ungkapan Sultan Hasan yang dikutip Muslim Ibrahim sebagai berikut: "Kerajaan ini mengambil teladan dan isi Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu *Adat Meukuta Alam* untuk kerajaan kita (Brunai Darussalam), karena ia benar-benar bersumberkan kepada Alquran, Hadits, Ijma' Ulama dan Qiyâs".³⁷ Upaya pelaksanaan Syari'at

³⁵ Abd. Mukti, *Revitalisasi*, h. 6-7.

³⁶ Ibrahim, *Langkah*, h. 178.

³⁷ *Ibid.*

Islam pada masa tersebut ditandai dengan peran sejumlah besar ulama dalam menetapkan hukum Islam, di samping keberadaan lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama sampai kasasi. Tingkat pertama adalah pengadilan kampung (*gampong*) yang dipimpin oleh *geusyik* (kepala *gampong*). Tingkat banding disebut peradilan balai hukum mukim dan diputuskan oleh *Uleebalang*. Sekiranya keputusan *Uleebalang* dinilai kurang adil, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan perkaranya ke panglima *sagoe*, dan paling tinggi adalah pengadilan kasasi, yang terdiri dari atas Sri Paduka Tuan, raja Banhara dan Faqih.³⁸ Dengan demikian dalam tatanan masyarakat Aceh, pranata sosial keagamaan telah berjalan dengan baik dan teratur. M. Hasbi Amiruddin dalam bukunya: *Aceh dan Serambi Makkah* menjelaskan bahwa “Banyak masyarakat yang masih mengklaim bahwa Aceh sama dengan Islam, maksudnya masyarakatnya”.³⁹ Agama Islam telah menjadi peraturan hidup bagi masyarakat Aceh, sehingga tidak heran di kemudian hari Islam menjadi *way of life*-nya masyarakat Aceh.

Kondisi keagamaan di Aceh sebagaimana yang telah disebutkan di atas bertahan sampai Belanda menyatakan perang dan menyerang Kerajaan Aceh Darussalam pada bulan April 1873. Setelah itu kondisi keagamaan di Aceh mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan negara dalam kondisi perang. Banyak para sejarawan cenderung setuju bahwa paruh kedua abad ke-19 adalah periode ekspansi wilayah dan persaingan *kolonial*, ketika sistem kapitalis modern, di bawah perlindungan politik, dimulai untuk menguasai negara di dunia. Salah satu contoh usaha *kolonial* di Asia Tenggara adalah agresi Belanda ke Aceh.⁴⁰

Untuk menghadang kolonialisme terhadap Aceh yang dimulai pada tahun 1873 tersebut *sentemen agama* memainkan peranan penting dalam menghadapi perang. Pada saat sultan tidak sanggup memimpin perlawanan, dan para

³⁸ Salim Segaf Al-Jufri (*et.al.*), “Pengantar” dalam *Penerapan Syari’at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004), h. 9.

³⁹ M. Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Serambi Makkah* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), h. 11.

⁴⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Nadiyah Foundation, 2003), h. 14.

Uleebalang tidak mampu untuk menyatukan aksi perlawanan rakyat lagi, muncullah ulama dari *dayah* untuk memimpin perang melawan penjajah kafir (Aceh: *kafee*). Pada waktu itu, ulama mengumumkan: "Ini merupakan tugas kita untuk bersatu melaksanakan *jihâd*"⁴¹ Berdasarkan hal ini, para ulama menjadi salah satu instrumen yang membawa konflik tersebut ke dalam perang suci. Melalui penyebaran ideologi *prang sabi* (perang suci),⁴² ulama mempengaruhi rakyat untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk berperang melawan musuh.

Agar status hukum menjadi jelas bagi rakyat Aceh, para ulama menggunakan jalan dengan teori Islam tentang perang suci. Ulama menyebut penjajah Belanda sebagai *kâfir al-harb*,⁴³ wilayah yang diduduki oleh Belanda dikatakan *dâr al-harb*. Menurut ulama, perang melawan Belanda merupakan kewajiban bagi kaum Muslim. Berperang melawan penjajah disebut *jihâd fî sabîlillâh*. Siapa yang gugur dalam pertempuran adalah *syâhid* dan akan masuk surga. Lebih dari itu, adalah dibolehkan untuk mengambil secara paksa harta yang dimiliki oleh *kâfir al-harb*, harta tersebut akan menjadi *ghanimah* (rampasan perang).⁴⁴ Strategi ini telah menambah keinginan rakyat untuk berperang kerana didasarkan pada perintah Allah.

Perang Aceh melawan Belanda akhirnya dapat berakhir pada tahun 1912,⁴⁵ setelah itu ulama kembali ke fungsi dasarnya yaitu mengajar di *meunasah*, *rangrang* dan *dayah* yang sudah lama ditinggalkan, yaitu sejak perang Aceh meletus tahun 1873 sampai tahun 1912.⁴⁶

⁴¹ C. Snouck Hurgronje, *The Acehnese* (Leiden: E.J. Brill, 1906), h. 177.

⁴² Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 151.

⁴³ E. Gobee and Adriaanse, *Nasehat-Nasehat C.S. Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, terj. Sukarsi (Jakarta: INIS, 1991), h. 111.

⁴⁴ *Ghanimah* berarti harta yang diperoleh dalam peperangan dari daerah kafir yang ditaklukkan, bisa berupa senjata, kuda atau semua barang yang dapat dipungut. Baca: Amiruddin, *Ulama*, h. 16.

⁴⁵ Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1951), jilid II, h. 174. Baca juga: Ali Hasjimy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 71.

⁴⁶ *Ibid.*

Sebagai akibat dari kolonialisme dan imperialisme yang sudah terjadi berpuluhan tahun di Aceh, maka tradisi keberagamaan masyarakat Aceh sesudah tahun 1912 sudah banyak terjadi praktek-praktek yang bercampur aduk dengan adat dan kebiasaan lokal. Hal ini antara lain karena pengalaman keagamaan lebih didasarkan pada cara mengikuti para pendahulu (*taqlîd*) dan tidak didasarkan pada pemahaman yang langsung (*ijtihâd*) dari Alquran dan Hadits. Praktek bermadzhab dipandang sebagai sebab utama munculnya praktek keagamaan yang bersifat *taqlîdî*. Ajaran-ajaran agama dipahami sebatas konsep yang diperkenalkan dan diajarkan oleh para imam madzhab sehingga secara umum para pengikutnya tidak terangsang untuk mempelajari Alquran dan Hadits. Kitab-kitab karya ulama klasik dijadikan pedoman utama dalam pengajaran agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan tradisional, sedangkan kitab-kitab modern yang mencoba memahami secara langsung Alquran dan Hadits diabaikan.

Bidang-bidang studi non-keagamaan yang memang tidak tersedia dalam kitab-kitab klasik tidak diajarkan sama sekali. Sampai menjelang didirikan Jami'ah Almuslim pada tahun 1929, tradisi yang demikian masih sangat dominan mewarnai kehidupan keagamaan di Aceh, sehingga dalam prakteknya pendidikan Islam agak identik dengan pengajian kitab-kitab ahli madzhab, yang kemudian dikenal dengan *al-kutûb al-mu'tabarât* (kitab-kitab muktabar).⁴⁷

Dalam kondisi keagamaan yang demikianlah Jami'ah Almuslim didirikan tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1348 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Nopember 1929 Masehi.

C. Kondisi Intelektual

Peta intelektual Aceh sepanjang sejarahnya telah memainkan peran penting di Nusantara, baik melalui dakwah Islâmiyah maupun pendidikan Islam.⁴⁸

⁴⁷ Harun Ismail, *Lintasan Sejarah Almuslim Peusangan dan Madrasahny* (Peusangan: Jami'ah Almuslim, 1414 Hijriyah), h. 31.

⁴⁸ Pendidikan Islam dilaksanakan di Aceh pada tahap awal terlaksana secara informal melalui adanya kontak antara pedagang atau *mubaligh* dan masyarakat sekitar. Selanjutnya dalam waktu yang relatif singkat terbentuk pula keluarga-keluarga Islam, terutama di *gampong-gampong* sekitar kota pelabuhan. Orang tua yang telah menganut agama Islam itu, tentunya tidak mengabaikan pendidikan Islam kepada keluarganya. Mereka mulai mengajarkan dasar-dasar

Kehadiran pendidikan Islam di Aceh sama tuanya dengan kehadiran agama Islam itu sendiri,⁴⁹ sebab antara pendidikan Islam dengan proses Islamisasi merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pada awal abad ke-18, kehidupan intelektual di Aceh mengalami perkembangan pesat dari abad-abad sebelumnya. Institusi pendidikan *meunasah*,⁵⁰

aqidah (kepercayaan), *ibadah* dan *mu'amalah* Islam kepada anak-anaknya di rumah (bahasa Aceh: *rumoh*) mereka masing-masing. Dalam pada itu jumlah keluarga Islam semakin banyak, juga sementara keluarga yang telah lebih duluan Islam, ilmunya di bidang keislaman semakin luas dan mendalam. Karena itu tidak mustahil apabila keluarga yang baru masuk Islam, setidak-tidaknya anak mereka dan orang-orang yang berminat kepada Islam mulai berdatangan ke rumah-rumah keluarga tersebut untuk belajar agama Islam. Sejak waktu itu muncul pendidikan di *remoh-remoh* orang yang dianggap alim oleh penduduk setempat, sehingga dapat disebut bahwa "*reumoh*" merupakan lembaga pendidikan dasar yang pertama lahir di Aceh. Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa* (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD, 2009), h. 30.

⁴⁹ Islam masuk ke Indonesia bukan melalui ekspansi militer, melainkan melalui dakwah (jalan damai). Dengan demikian tidak kita jumpai catatan sejarah yang menyebutkan secara pasti tahun masuknya Islam ke Indonesia. Para peneliti sejarah berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah/ketujuh Masehi atau kedelapan Masehi. Pendapat ini dikemukakan oleh Arnold, dan diikuti oleh para sarjana Indonesia. Ia berargumen bahwa sejak abad ini sudah terjadi hubungan dagang antara masyarakat Indonesia yang berdomisili di daerah pesisir utara Sumatera dan saudagar Muslim asal Arabia. Sebagian lagi mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada akhir abad ketigabelas. Pendapat ini dikemukakan oleh Marrison. Ia berargumen bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh para penyebar Islam dari pantai Coromandel. Dikatakan bahwa kebanyakan penyebar Islam profesional ini datang ke Indonesia pada abad keduabelas dan ketigabelas. Kebanyakan peneliti cenderung mengatakan bahwa sangat memungkinkan Islam sudah diperkenalkan ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah/Ketujuh Masehi, tetapi hanyalah setelah abad keduabelas pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Lihat: N.A. Baloch, *Advet of Islam in Indonesia*, Edisi I (Islamabad: Islamabad National Institute Historical and Cultural Research), h. 56-57. Lihat Juga: Abd. Mukti, *Sejarah Pertumbuhan*, h. 15. Bandingkan dengan: Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan*, cet. I (Bandung: Mizan, 1994), h. 24-31.

⁵⁰ Meunasah terdapat di setiap kampung di Aceh yang berfungsi sebagai sekolah dasar (*Ibtidaiyah*). Materi yang diajarkan pada tingkat Meunasah, yaitu: menulis, dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Jawi/Melayu, akhlak, dan sejarah Islam. *Meunasah* merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur masyarakat kampung di Aceh. *Meunasah* merupakan lembaga pendidikan tradisional yang mempunyai asal usul, tradisi dan filosofi yang sama dengan dayah. Pendidikan di *meunasah* berjalan baik dan lancar karena faktor kesadaran orang tua untuk bertanggung jawab atas pendidikan anaknya sejak dini. Di sini belajar semua anak anggota masyarakat tanpa kecuali, dengan tidak memandang status sosial dari setiap individu, pendidikan dianggap sebagai suatu ibadah wajib atas setiap muslim. Kewajiban guru adalah mengajar dan kewajiban murid adalah belajar atas dasar perintah agama. Baca: Snouck Hurgronjoe, *Aceh Di Mata Kolonialis*, Jilid I (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), h. 68.

*rangkang*⁵¹ dan *dayah*⁵² yang sudah ada semenjak kesultanan Pasai,⁵³ terus dipelihara dan mengalami peningkatan, baik secara kualitas, maupun kuantitas. Ini dibuktikan dengan jumlah *dayah* pada masa itu terus meningkat, demikian juga

⁵¹ Rangkang merupakan lembaga pendidikan tingkat *Stanawiyah* yang menerima murid-murid tamatan muenasah. Baihaqi menyatakan bahwa kurikulum/materi yang diajarkan pada tingkat Rangkang di Aceh adalah sebagai berikut: *Pertama*, Nahu: *Tahrîr al-Aqwâl*, *Matan al-Âjurrumiyyat* dan *Mutammimah*. *Kedua*, Sharaf: *Matan Bina*, *Salasal al-Mudkhâl*, *Al-Kailanîy* dan *Al-Mathlûb* (kadang-kadang). *Ketiga*, Fiqh: *Matan Taqrîb*, *Fath al-Qarîb* (*Hâsiyyat al-Bajûriy*), dan *Fath Mu'in* (*ʿanat al-Thalîbin*). *Keempat*, Tauhîd: *Matan Sanusiyy*, *Kifayat al-Awwâm*, dan *Huḍhurîy*. *Kelima*, Usul Fiqh: *Alfiyyat*, *Al-Waraqât*, *Latha'if al-Isyârat*, *Ghâyat al-Wushul* (kadang-kadang). *Keenam*, Mantîq: *Matan al-Sullâm* dan *Iḍḥah al-Mubhâm*. *Ketujuh*, Balaghah: *Majmû' Khams Rasâil* dan *al-Bayân*. *Kedelapan*, Akhlak -Tasawuf: *Muraqî al-'Ubudîyyat* dan *Tambih al-Ghâfilîn*. *Kesembilan* Lainnya: Sesuai petunjuk *Teungku dirangkang*. Semua pelajaran yang terdapat di tingkat pendidikan rangkang diajarkan dalam Bahasa Arab. Baca: Baihaqi, A.K. *Ulama dan Madrasah Aceh* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 158.

⁵² Materi pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan tingkat *dayah* manyang adalah: *Pertama*, Hukum Islam, dengan kitabnya: *Tuhfah al-Muhtâj*, *Nihâyat al-Muhtâj* (10 Jilid) dan *Nihayatul Muhtaj* (10 Jilid). *Kedua*, Hadits, dengan kitabnya: *Fath al-Bârî* (13 Jilid), *Qustalani* (10 Jilid). *Ketiga*, Tasawuf, dengan kitabnya: *Syarah Ihya' Ulûm al-Dîn* Ibn 'Arabîy (10 Jilid). *Keempat*, Tafsir, dengan kitabnya: *Ibn Jârir At-Thâbarîy*. *Kelima*, Dan kitab-kitab lainnya yang ditentukan oleh *Teungku Chiek*, seperti: Ilmu Falak, Ilmu Hisab, Ilmu Thibb dan sebagainya. Belajar di *dayah* manyang dengan *Teungku Chiek* pada dasarnya merupakan pendalaman berbagai ilmu agama atau ilmu lain. Oleh karena itu metode belajarnya lebih mendekati diskusi, *debad* (*Al-Mujâdalah*), bertukar pikiran dan tidak lagi terikat dengan hanya satu kitab sebagai buku pegangan. Namun demikian kitab-kitab besar tersebut di atas merupakan sebagai pedoman dasar saja. Baca *Ibid.* h. 160.

⁵³ S.Q. Fathimi, sebagaimana dikutip Abd. Mukti, menyebutkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai banyak dipengaruhi oleh Persia dan Arab, meskipun kebanyakan saudagar yang datang ke kepulauan Indonesia berasal dari India. Kelihatannya hal ini didukung oleh kedudukan Samudra Pasai sebagai sebuah negara maritim, karena itu mempunyai jaringan hubungan yang luas dengan Timur Tengah dan dunia Islam lainnya. Dalam pada itu kekacauan politik yang terjadi di wilayah-wilayah kekuasaan Dinasti Abbâsiyah (750-1258) menyebabkan banyak ulama dari Persia pindah ke daerah-daerah Muslim yang baru diislamkan, termasuk Kesultanan Pasai, salah satu tujuannya mencari perlindungan (*patronase*). Hal ini terjadi pada akhir abad ke-13. Di antara ulama-ulama yang mendapat perlindungan (*patronase*) sultan ketika itu adalah Amîr Sa'îd al-Syîrâzi berasal dari Syîrâz dan Tâj al-Dîn al-Isfahâniy, berasal dari Isfahân. Keduanya berkebangsaan Persia, Abd Allâh ibn Muḥammad (w. 810/1407), berasal dari Delhi, India, Amîr Muḥammad ibn Abd. Al-Qâdîr (w. 822/1419), berasal dari keluarga Khalifah al-Mastanshir al-Abbâsiy (623/1226-640/1243). Para ulama tersebut dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam menganut sistem pendidikan dan pengajaran yang pernah dikenal di negerinya masing-masing. Dengan demikian ulama yang berasal dari Persia memusatkan pendidikan dan pengajarannya di *meunasah* (Arab: *madrasah*) dan *dayah* (Arab: *zawiyât*). Sementara ulama yang berasal dari India memperkenalkan pula institusi *rangkang*. Inilah yang menjadi alasan para sejarawan menyatakan bahwa kebudayaan Islam nusantara sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Persia yang disebut dengan *Perso Muslim Culture* (kebudayaan Muslim Persia), karena kehadiran mereka di nusantara telah memperkenalkan institusi-institusi pendidikan Islam pada kesultanan Pasai sebagaimana tersebut di atas. Atas dasar itu menunjukkan bahwa institusi pendidikan Islam berupa *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* memang benar telah dikenal sejak kerajaan Samudra Pasai berkuasa. Baca: Abd. Mukti, *Studi Islam: Paradigma Pendidikan Islam Sejak Periode Klasik Hingga Modern* (Buku, tidak diterbitkan, t.t.), h.214.

dengan jumlah ulama yang mengajar. Selain ulama lokal yang semakin lama semakin tumbuh, sultan juga mengundang ulama-ulama yang dari luar negeri. Ulama-ulama yang diundang tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk kebutuhan kerajaan sendiri sebagai konsultan bidang hukum agama. Sebagian ulama daerah turut memperdalam ilmunya di luar negeri, terutama ke Haramain (Makkah dan Madinah). Bukti lain adalah terdapat sejumlah kitab-kitab ilmiah yang bereputasi internasional di tulis oleh sejumlah ulama Aceh di zaman Kerajaan Aceh Darussalam (1507-1912).⁵⁴

Meunasah dalam masyarakat Aceh di samping berfungsi sebagai tempat mengendalikan pemerintahan *gampong*, baik dalam bidang adat maupun agama, juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. *Meunasah* menyelenggarakan pendidikan pada tingkat rendah di bawah pimpinan *Teungku Imum Meunasah*. Kerikulumnya meliputi Alquran, bahasa Arab, dan dasar-dasar pengetahuan agama. Kitab-kitab yang dikaji pada *meunasah* selain Alquran adalah kitab *Masâil al-Muhtadî li Ikhwân al-Mubtadî*, tanpa disebutkan nama pengarangnya. Namun menurut Laffan pengarangnya adalah Ahmad ibn Muhammad Zayn al-Fathani (1856-1906), *Bidâyat al-Mubtadî*, karangan Syekh Shalih al-Jawi, *al-Âjurrâmiyyat*, karangan Ibn. Ajurrum (w. 723/1323) dan *Kîtab 'Awâmil*. Bahkan jika *Teungku Imum Meunasah* ternyata seorang 'alim besar, maka kajiannya meliputi kitab *Hâsiyyat al-Bajûry*, 2 jilid, karya al-Bajûry (w. 676/1277) dan *Kîtab Alfîyyat* karya Ibn Mâlik (w. 1274). Sistem pengajaran *meunasah*, adalah guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa *Meulayu* atau bahasa Aceh, kemudian meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan murid. Pendidikan *meunasah* hanya diikuti murid laki-laki saja, sementara murid perempuan belajar dengan *puruemoh* (isteri) *Teungku Imum Meunasah* di rumahnya dan mereka menginap di rumah tersebut. Dalam hal ini fungsi *meunasah* adalah mempersiapkan murid-murid yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah, yakni *ranggang*.⁵⁵

⁵⁴ M. Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Serambi Makkah* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), h. 25.

⁵⁵ Abd. Mukti, *Sejarah Pertumbuhan*, h.18-19.

Rangkang menyelenggarakan pendidikan pada tingkat menengah, sebagai kelanjutan dari *meunasah*. Karena itu lembaga pendidikan ini tidak dijumpai pada setiap desa (Aceh: *gampong/huta*) akan tetapi dijumpai pada setiap wilayah *kemukiman*. Wilayah *kemukiman* terdiri dari beberapa desa di bawah pimpinan seorang pejabat yang disebut *Mukim*. Biasanya satu kecamatan dibagi ke dalam empat *kemukiman*. Pejabat *Mukim* bukanlah pimpinan formal, melainkan sebagai koordinator. Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman kesultanan Pasai. Paling tidak setiap wilayah *kemukiman* memiliki sebuah mesjid, di sekeliling mesjid inilah dibangun beberapa *Rangkang* sebagai tempat pendidikan menengah bagi putra-putri Aceh di zaman kesultanan Pasai. Pimpinan *rangkang* disebut *teungku rangkang*. Kualifikasi *teungku rangkang* adalah seorang *'âlim* yang sudah menamatkan pendidikannya pada tingkat *dayah*. Sesuai dengan jenjangnya, maka pada *rangkang* diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama Islam setingkat lebih tinggi dari pendidikan pada *meunasah*. Kurikulumnya meliputi pengetahuan agama dan bahasa Arab. Untuk pengetahuan bahasa Arab dipakai kitab *al-Âjurrûmiyyat*, karya Ibn Âjurrûm (w. 723/1323). Sementara untuk pengetahuan agama dipakai *Matan Taqrîb*, karya Abû Syujâ' (w. 593/1196) dan *kîtab Hâsiyyat al-Bajûry*, 2 jilid, karya al-Bajûry (w. 676/1277). Semua kitab ini berbahasa Arab. Sistem pengajarannya adalah guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa *Meulayu* atau bahasa Aceh, kemudian guru meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan murid. Fungsi *rangkang* adalah mempersiapkan murid-muridnya yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat *dayah*. Biasanya murid-murid *rangkang* menginap di *rangkang* sebagaimana halnya murid-murid *meunasah*. Karena menurut ajaran Islam sejak *aqil-baligh*, anak-anak harus berpisah tempat tidurnya dengan orang tuanya, dan karena itu pula rumah-rumah di Aceh tidak mempunyai kamar tidur khusus untuk anak-anaknya yang sudah remaja.⁵⁶

Dayah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Aceh sejak zaman kesultanan Pasai. *Dayah* dipimpin oleh seorang ulama besar

⁵⁶ *Ibid.*, h. 19-20.

yang disebut *teungku chik*. Karena itu dayah hanya dijumpai di setiap daerah di mana setiap ulama besar berdomisili. *Dayah* menerima lulusan-lulusan *rangkang*. Dengan demikian tidak jarang seorang lulusan *rangkang* harus meninggalkan *gampong* (desa) halamannya (*meudagang*) untuk menuntut ilmu pengetahuan pada *dayah* yang diinginkannya. Bahkan mereka harus tinggal bertahun-tahun di dayah untuk menjalani studinya. Di sini mereka belajar memasak dan mencuci sendiri pakaiannya. Hal ini diperlukan untuk mengajarkan murid-murid *dayah* bisa hidup mandiri. *Dayah* mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama Islam yang tinggi, meliputi ilmu fiqh, ushul fiqh, tauhid, tafsir, hadits, balaghah dan mantiq. Untuk kelancaran pendidikan dan pengajaran, *teungku chik*, biasanya mengangkat asisten yang disebut *teungku rangkang*, dan asisten ini seringkali direkrut dari kalangan murid-muridnya yang cerdas.⁵⁷

Di sisi lain, pada awal abad ke-18, Aceh masih dibayang-bayangi zaman keemasan (*golden age*) sebagai warisan dari pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai sultan yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan ulama. Pada masa kepemimpinannya inilah hidup tiga ulama besar dan terkenal di Nusantara, Syekh Syams al-Dîn al-Sumathrany (w. 1240/1630), Syekh Nûr al-Dîn al-Rânîry (w. 1068/1658) dan Syekh Abd. al-Rauf al-Singkîly (1615-1693).⁵⁸ Syekh Syams al-Dîn al-Sumathrany, dipilih sebagai penasihat dan *mufti* (disebut *Syekh al-Islâm*) yang bertanggungjawab dalam urusan keagamaan pada Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Iskandar Muda.⁵⁹ Dalam kenyataannya al-Sumathraniy tidak hanya sebagai penasihat agama, tapi juga terlibat dalam urusan politik. Al-Sumatraniy juga pernah mengabdikan pada Sultan al-Mughayat Syah (1589-1602), raja sebelum Iskandar Muda. James Lancaster, utusan khusus dari Inggris ke Aceh pada tahun 1602, menggambarkan dalam catatan perjalanannya bahwa ada seorang bangsawan ”*chief bishop*” yang diperkirakan orang tersebut adalah al-Sumatraniy

⁵⁷ *Ibid.*, h. 20.

⁵⁸ Abd. Mukti, *Sejarah*, h. 25.

⁵⁹ Teuku Iskandar, *De Hikajat Atjeh* (‘S-Gravenhage: N. V. De Nederlandshe Boek-en Stendrukkerij, V.H.H.L. Smits, 1959), h. 137, 153, 168.

yang terlibat dalam perundingan perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Inggris dan Aceh.⁶⁰

Nûr al-Dîn al-Rânîry (w. 1658) dipilih sebagai *Qâdî al-Mâlik al-'Âdil* pada periode Sultan Iskandar Tsani dan beberapa tahun pemimpin berikutnya. Safîat al-Dîn menggambarkan sosok intelektual Al-Rânîry sebagai orang hebat, dia pada dasarnya seorang sufi, teolog dan *fâqih*, tetapi dia juga pengarang, penasehat, dan politikus. Pada masa Iskandar Tsani, ia memainkan peran penting dalam bidang ekonomi, politik, keagamaan dan pendidikan Islam.⁶¹ Syekh Abd. al-Rauf al-Singkîly (1615-1693) ditetapkan sebagai *Mufti* dan *Qâdî al-Mâlik al-'Âdil* selama periode empat ratu (1641-1699) kepemimpinan Kerajaan Aceh Darussalam.⁶² Sultanah yang dia menjadi *Mufti* dan *Qâdî al-Mâlik al-'Âdil* adalah Tâj al-'Âlam Safîyyat al-Dîn (1641-1675), isteri dan pengganti Iskandar Tsani merupakan ratu yang pertama. Sultanah berikutnya adalah Nûr al-'Âlam Naqîyyat al-Dîn (w. 1678), hanya memimpin kerajaan selama 3 tahun, mangkat pada tanggal 23 Januari 1678. Dia digantikan oleh Sultanah yang lain, anaknya sendiri, Inâyat Syah Zakîyyat al-Dîn (w. 1688). Sultanah ini memimpin Kerajaan Aceh selama 10 tahun, dia digantikan oleh Keumalat Syah sebagai sultanah yang keempat dan sultanah terakhir yang memimpin kerajaan Aceh. Setelah lebih kurang 10 tahun Keumalat Syah diturunkan pada tahun 1699.⁶³

Al-Singkîly sering terlibat dalam urusan politik, khususnya dalam hal menyelesaikan situasi konflik politik internal. Simbol intelektual al-Singkîly memainkan peranan penting, misalnya, ketika ada delegasi yang diutus oleh Syârif Mekkah ke Aceh, pada masa Sultanah Zakîyyat al-Dîn. Kedatangan rombongan ini untuk menyelesaikan perdebatan di kalangan orang Aceh

⁶⁰ James Lancaster, *The Voyage of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies*, Sir William Foster (ed.) (London: The Hakluyt Society, 1940), h. 96.

⁶¹ Azyumardi Azra, "The Transmission of Islamic Reform to Indonesia: Net Works of Middle Eastern and Malay Indonesia *Ulama* in the Seventeenth and Eighteenth Centuries" (Disertasi, Columbia University, New York, 1992), h. 351.

⁶² Ali Hasjimy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 32-40.

⁶³ Amiruddin, *Ulama*, h. 8.

mengenai masalah kebolehan wanita sebagai pemimpin menurut hukum Islam.⁶⁴ Perdebatan ini sudah lama terjadi di kalangan orang Aceh. Dalam hal ini al-Singkîly tidak memberikan jawaban yang jelas, karenanya dapat dipahami bahwa al-Singkîly mendukung kepemimpinan wanita (*sultanah*), namanya menjadi simbol otoritas ulama di Aceh. Akhirnya setelah al-Singkîly meninggal, sultanah yang terakhir *dimakzul*-kan, berdasarkan fatwa dari ketua Mufti Mekkah, yang memutuskan bahwasanya syari'at Islam tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin pada kerajaan Islam.⁶⁵

Kemajuan pendidikan pada abad ke-18 ditandai dengan banyaknya ahli ilmu pengetahuan (ulama) yang berkumpul terutama di ibu kota kerajaan dan adanya usaha-usaha pembangunan lembaga pendidikan di seluruh wilayah kerajaan. Di samping juga dilakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan *meunasah*, *rangrang* dan *dayah* lama di daerah bekas kerajaan-kerajaan lokal dulu (*nanggroe*), juga didirikan sejumlah besar lembaga-lembaga pendidikan baru. Di ibu kota Banda Aceh didirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi, yaitu *Jâm' Bayt al-Rahmân*. Dalam ukuran sekarang *Jâm' Bayt al-Rahmân* dapat disamakan dengan institut.⁶⁶

Mengenai kemajuan pendidikan di Kerajaan Aceh pada waktu itu, kiranya laporan perjalanan Augustin de Beaulieu dapat memberikan sekedar gambarannya. Beaulieu mengatakan sebagaimana dikutip oleh Sufi, bahwa di Aceh seni kerajinan yang berhubungan dengan pertukangan sangat dihargai, di sana banyak terdapat tukang-tukang besi yang pandai membuat bermacam-macam alat dari besi, tukang-tukang kayu yang ahli membuat kapal-kapal dan perahu-perahu dari kayu dan juga tukang-tukang penuang tembaga yang mahir. Kapal-kapal *galley* orang Aceh amat bagus, penuh dengan ukiran-ukiran, berbadan tinggi dan lebar, layar-layar pada kapal itu berbentuk segi empat sama dengan layar-

⁶⁴ C. Snouck Hurgronje, *Een Mekkaansh Gezantschap Naar Atjeh in 168* (t.t.p: BKI-65, 1991), h. 144.

⁶⁵ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 169.

⁶⁶ T. Iskandar, *Nuruddin Ar-Raniry: Bustanus Salatin* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), h. 36.

layar pada kapal milik Perancis. Papan-papan pada sisi kapal tebalnya enam jari jempol, karenanya sebuah kapal milik Kerajaan Aceh tidak kalah dengan sepuluh kapal *galley* milik orang Portugis.⁶⁷ Keahlian semacam ini tidak mungkin ada, tanpa melalui lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan tersebut tidak mustahil juga berpusat di *Jâm' Bayt al-Rahmân*. Berapa jumlah lembaga pendidikan pada saat itu, tidak diketahui secara pasti. Snouck Hurgronje (1857-1936) yang dianggap sebagai peneliti perintis mengenai soal-soal Aceh dalam karya besarnya, *De Atjehers* (2 juld, 1893/1894) juga tidak meyinggung jumlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Aceh pada waktu itu.⁶⁸ Namun demikian *meunasah* (Arab: *madrrasah*) yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dasar telah ada di setiap Gampong (*huta*), *rangkang* sebagai lembaga pendidikan menengah telah ada di setiap Pemukiman. Sedangkan *dayah* (Arab: *zawiyât*) sebagai lembaga pendidikan tinggi juga telah didirikan di setiap *uleebalang* (Kabupaten) pada masa kesultanan Aceh Darussalam berkuasa.⁶⁹

Pada awal abad ke-19 kondisi intelektual di Aceh walaupun tidak dikatakan mengalami peningkatan, tetapi juga tidak kalah hebatnya jika dibandingkan dengan bad-abad sebelumnya. Pada abad ini, setidaknya terdapat lima orang ulama yang kepakaran dan karyanya mempunyai nilai tersendiri dibandingkan dengan ulama dan karya-karya lainnya. Mereka adalah Jalal al-Din al-Tursani, Muhammad Zayn al-Asyi (w. 1770), Muhammad al-Langgini yang lebih dikenal dengan Teungku Chik Di Simpang, Abbas al-Asyi (w. 1895) yang lebih dikenal dengan Teungku Chik Kuta Karang dan Ismaîl ibn Abd al-Muthallib al-Asyi.

Jala al-Din al-Tursani mempunyai kepakaran dalam bidang Hukum Pemerintahan dan Tata Negara. Jala al-Din al-Tursani, nama

⁶⁷ Rusdi Sufi dan Agus Budi Eibowo, *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Mas* (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD, 2009), h. 39.

⁶⁸ Muslim A. Djalil, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional pada Masa Kesultanan Aceh* (Periode Tahun 1520-1675) dalam *Santunan Jadid* (15 Desember 2008), h. 43.

⁶⁹ Penjelasan lebih lanjut mengenai *meunasah*, *rangkang* dan *dayah*, baca: Chairan M. Nûr, "Dayah Sejak Sultan Hingga Sekarang", dalam *Dayah* (Desember 2008), h. 22. Bandingkan: Abd. Mukti, *Sejarah*, h, 18-20.

lengkapnya Jala al-Dîn ibn Kamal al-Dîn al-Tursâni, adalah pengarang kitab *Sâfînat al-Hukkâm*⁷⁰ (Bahtera bagi Penegak Hukum), *Hidayat al-`Âwwâm* (Petunjuk bagi Orang-Orang Awam), dan *Munzar al-Ajla ila Ruthbat al-'alâ* (Cermin yang Bersih Menuju Martabat yang Tinggi). Ia termasuk murid utama Syekh Abd. al-Rauf al-Singkily, dan salah seorang ulama Nusantara yang bergelar *al-'Âlim al-'Âllamah* (semacam Guru Besar). Gelar *al-'Âlim al-'Âllamah*, hanya diperoleh oleh sebagian kecil ulama Melayu Nusantara, termasuk di antaranya Muhammad al-Nawawi al-Bantani (1813-1897),⁷¹ Yusuf al-Makassari, dan Muhammad Zayn al-Asyi. Ini menunjukkan Jalal al-Dîn al-Tursâni, dan juga Muhammad Zayn al-Asyi setingkat, atau setidaknya tidaknya mendekati tingkatan Muhammad al-Nawawi al-Bantani dan Yusuf al-Makassari dalam aspek keilmuannya. Kepakaran Jala al-Dîn al-Tursâni dalam bidang hukum ketatanegaraan membuatnya dipilih menjadi *Qâdî Mâlik al-'Âdil* oleh Sultan dalam dua pemerintahan, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Maharaja Lela Ahmad Syah (1139 H/1727-1147/1736) dan Sultan Alaidin Johan Syah (1736-1760).⁷²

Muhamamad Zayn (w. 1770) memiliki kepakaran dalam bidang Hukum Syari'at dan Teologi, Nama lengkapnya adalah Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jala al-Din al-Asyi, adalah seorang ulama besar, yang dalam salah satu karangannya terbitan Mushthafa al-Bâb al-Halabî wa Aulâd, Mesir, tahun 1344/1925 dan 1346/1927 disebutkan gelarnya: *al-'Âlim al-'Âllamah al-Syeikh Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jala al-Din al-Asyi al-Syâfi'i*.⁷³ Dalam

⁷⁰ Wan Mohd. Shaghir Abdullah, "Syeikh Jalaluddin al-Asyi: Kesenambungan Aktiviti Ulama Aceh", www//ulama.blogspot.m, 21 Oktober 2010.

⁷¹ Muhammad al-Nawawi al-Bantani lahir di Tanu Banten, Jawa Barat (sekarang Propinsi Banten). M. Nawawi menetap di Mekah sejak tahun 1855, dan menjadi salah seorang ulama Jawi yang paling terkenal di Haramayn. Ia menghasilkan 26 karya, dan yang paling terkenal adalah *Tafsir Nur Marah Labib*. Lihat Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengan dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Edisi Revisi, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 379.

⁷² Abdul Hadi W.M, "Aceh dan Kesusteraan Melayu", dalam Saron W. Kusumo (Peng.), *Aceh Kembali ke Masa Depan*, cet. 1 (Jakarta: IKJ Press, 2005), h. 246-248.

⁷³ Lihat Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jalaluddin, *Kasyf al-Kiram fi Bayan Niyat Takbirat al-Ihram*, (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, Muharram 1344,) h. 1.

kitabnya yang lain,¹⁴ terbitan tahun sebelumnya, Sya'ban 1342/1923 disebut 'Âllamah al-Fâdhîl Tuan Syeikh Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jalal al-Din al-Asyi. Masa Sultan 'Âlâa al-Dîn Mahmud Syah (1174-1195/1760-1781) ia menjadi *Qâdîmâlik al-`Âdil*.⁷⁴

Muhammad al-Langgini kepakarannya dalam bidang tasawuf, memiliki nama lengkap Muhammad ibn Ahmad Khatib al-Langgini, terkenal dengan Teungku Chik di Simpang, adalah pengarang kitab *Dawâ' al-Qulûb min al-Ûyûb*, dan *Mi'raj al-Sâlikîn ila Marthâbat al-Wâliyyîn bi Jah Sayyîd al-`Ârifîn*. Ia lahir di Langgien, Teupin Raya, Pidie, dan hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaidin Sulaiman Ali Iskandar Syah (1251-1273/1836-1857) hingga Sultan Alaidin Mahmud Syah (1286-1290/1870-1874).⁷⁵ Al-Langgini adalah seorang ahli tasawuf dan penegas ajaran neo-sufisme Nuruddin al-Rânirî dan Abdurrauf al-Fansûrî. Berdasarkan hasil karyanya, yaitu, *Dawâ' al-Qulûb* dan *Mi'raj al-Sâlikîn*. ia dapat digolongkan ke dalam penganut ajaran tasawuf Amali yang mengikuti ajaran *Ahl Sunnah wa al-Jamâ'ah* (Sunni), yakni bermazhab Syâfi'i dalam fiqhnya. Ia dapat juga dijadikan sebagai representasi ulama tasawuf independen abad ke-19.⁷⁶

Abbas al-Asyi (w. 1313) yang lebih dikenal dengan Teungku Chik Kuta Karang, lahir di Kuta Karang (Aceh Utara),⁷⁷ dan meninggal tahun 1313. Ia tidak hanya dikenal sebagai ulama perang *sabil* dan pejuang kemerdekaan, tetapi juga ulama intelektual yang menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti kedokteran (*al-thibb*), teknik (*al-handasab*) dan astronomi (*al-Nujûm/al-falak*). Dilihat dari kandungan intelektual yang terkandung dalam karyanya ia dapat juga disebut sebagai ulama teknokrat dan seorang dokter zamannya. Kepakarannya tersebut dapat

⁷⁴ Ali Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi dan Tanah Aceh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1978), h. 80.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 78-79.

⁷⁶ Erawadi, *Tradisi, Wacana dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad XVIII dan XIX*, (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 134.

⁷⁷ Ismail al-Asyi (ed.), *Tâj al-Mulk al-Murashshâ' bi anwi'i al-Durar wa al-Manḍumat*, cet. 3 (Mesir: Mushtafa al-Bâb al-Halâbi wa Aulâduh, 1357/1938), h. 27.

ditelusuri melalui karya-karyanya, di antaranya kitab *Sirâj al-Zhalâm fi Ma`rifat al-Sa'd wa al-Nahs fi Syuhûr wa al-Ayyâm*, *Kitâb al-Rahmân fî Thibb wa al-Hikâmat* dan juga kumpulan karya lainnya dalam *kitâb Jam`û Jawâmi` al-Mushanafât*, yang meliputi pembahasan tentang *fa'âl* (*ramalan*), obat-obatan dan *ma'jûn*, *`âzimat*, *ghâlib maghlûb*, *ta'bir* mimpi, ilmu mendirikan rumah, dan ilmu firasat.⁷⁸

Ismail ibn Abd al-Muthallib al-Asyi merupakan seorang ulama yang tidak saja aktif dalam penyusunan (*al-jam`û/editing*) sejumlah kitab karya ulama terdahulu, tetapi juga ia menulis sejumlah karya keagamaan. Di antara kitab hasil editingnya adalah kitab *Jami`û Jawâmi` al-Mushannafât*⁷⁹ dan *Tâj Mûlk al-Murahshâ' bi Anwa' al-Dûrar wa al-Manzhûmat*. Kitab *Jami`u Jawâmi` al-Mushannafât* dalam masyarakat Aceh biasa disebut dengan Kitab *Jawami'* atau Kitab *Lapan* (kitab delapan), yang merupakan kumpulan delapan karangan yang dikarang oleh enam orang ulama Aceh, Sementara kitab yang disebut terakhir biasa disebut dengan kitab *Tâj al-Mulk*.⁸⁰ Inilah barangkali peta intelektual di Aceh abad ke-18 dan awal abad ke-19.

Paruh kedua abad ke-19 kondisi intelektual di Aceh mengalami masa-masa suram. Hal ini terjadi karena pada periode ini adalah masa ekspansi wilayah dan persaingan kolonial, ketika sistem kapitalis modern, di bawah perlindungan politik, dimulai untuk menguasai negara di dunia. Salah satu contoh usaha kolonial di Asia Tenggara adalah agresi Belanda ke Aceh pada tahun 1873.⁸¹ Menurut Ali Hasjimy, perang Aceh adalah perang kolonial yang terbesar dalam sejarah dunia, karena rakyat Aceh yang telah beratus-ratus tahun ditempa dengan ajaran Islam, telah memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka sanggup

⁷⁸ Erawadi, *Tradisi*, h. 135.

⁷⁹ Ismaîl ibn Abd. al-Muthâllib al-Asyi (ed.), *Jam'u Jawami' al-Mushannafât* (Mesir: Mushtafa al-Bâb al-Halâbî wa Aulâduh, 1344 H), h. 1-2.

⁸⁰ Erawadi, *Tradisi*, h. 136.

⁸¹ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003), h. 14.

berperang lebih setengah abad untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaanya.⁸²

Pendidikan Islam yang telah membina dan membentuk jiwa-raga masyarakat Aceh semenjak zaman Kerajaan Peureulak, Kerajaan Samudra Pasai, sampai Kerajaan Aceh Darussalam, telah membuat dunia tercengang oleh kemampuan perang Aceh, sehingga hampir-hampir pemerintah kolonial Belanda jatuh bangkrut, karena biaya perang yang terlalu besar. Walaupun demikian, pada akhirnya Aceh harus mengakui bahwa menghadapi agresi kolonial Belanda merupakan pekerjaan berat. Peperangan dahsyat yang berlangsung sejak tahun 1873 dan dinyatakan berakhir pada tahun 1912⁸³ telah membuat Aceh mengalami kehancuran total. Kota-kota menjadi rata dengan tanah, istana dan gedung-gedung yang megah hancur menjadi debu, rumah rakyat musnah dibakar musuh, tidak terhitung banyaknya pemuda-pemuda kusuma bangsa gugur dan syahid sebagai pahlawan, tidak terkira lagi harta kekayaan musnah lenyap, *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* sebagai pusat pendidikan Islam menjadi porak-poranda, karena para ulama, guru dan santrinya terjun ke medan perang. Tidak cukup dengan itu saja, bahkan *Jâm' Bayt al-Rahmân* sebagai pusat kegiatan Islam di Aceh dibakar oleh tentara kolonial Belanda⁸⁴ dalam tahun 1906.⁸⁵

Selama masa perang Aceh setengah abad itu, dalam batas-batas memungkinkan, para ulama tetap mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau siang hari mereka memimpin para pemuda berperang melawan musuh, maka pada waktu malam mereka mengajar para pemuda itu agar menjadi manusia yang berilmu. Ruangan tempat belajar kadang-kadang di bawah pokok kayu dan kadang-kadang dalam gua-gua atau di bawah rimbunnya rimba belantara. Kaum ibu yang tidak ikut ke medan perang bertindak sebagai guru, mendidik dan mengajarkan anak-anak, baik yang berhubungan dengan agama

⁸² Hasjimy, *Bunga Rampai*, h. 82.

⁸³ Pane, *Sejarah*, h. 174. Baca juga: Hasjimy, *Ulama*, h. 71.

⁸⁴ Hasjimy, *Bunga Rampai*, h. 83

⁸⁵ Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhâmiyah Dinasti Saljûq*, cet. 1 (Bandung: Citapustaka, 2007), h. 277.

maupun menanamkan semangat perang dengan membaca bait-bait hikayat *prang sabi*.⁸⁶ Inilah peta intelektual Aceh pada abad ke-19 M.

Kondisi intelektual Aceh abad ke-20 agaknya lebih menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Hal ini setidaknya disebabkan oleh empat faktor. *Pertama*, pada abad tersebut perang Aceh dianggap selesai, walaupun pada hakikatnya perang tetap masih berlanjut sampai tahun 1945. *Kedua*, lembaga pendidikan *meunasah* dan *dayah* sudah mulai dibangun kembali. *Ketiga*, Sekolah Belanda sudah mulai diperkenalkan di Aceh, *Keempat*, pembaruan pendidikan Islam yang terjadi di belahan dunia Islam seperti di Mesir, Turki, India dan Nusantara sudah mulai direspon oleh ulama Aceh.

Pada tahun 1903 tentara Kolonial Belanda dapat menawan Sultan Aceh yaitu, Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah, Tuanku Raja Keumala, Teuku Panglima Polem Muda Perkasa Muhammad Daud dan pimpinan-pimpinan Aceh lainnya. Sejumlah ulama turun melaporkan diri kepada penguasa militer Belanda, setelah ada pengumuman dari Pemerintah Hindia Belanda bahwa siapa saja dari pimpinan perang gerilya Aceh yang mau melaporkan diri kepada penguasa militer Belanda tidak akan dihukum. Setelah ada pengumuman tersebut, para ulama yang memimpin perang gerilya berunding. Perundingan tersebut menghasikan kesepakatan bahwa sebagian dari mereka diperbolehkan melapor diri kepada penguasa militer Belanda dengan tugas membuka kembali *dayah-dayah* sebagai tempat pendidikan putra-putri Aceh pada masa itu, sementara sebagian ulama lainnya tetap melanjutkan perang gerilya dalam rangka mengusir *kâfir laknat Allâh* di Aceh. Dengan pembagian tugas yang demikian, maka perang gerilya dapat dilanjutkan terus dan pendidikan Islam dapat pula dilaksanakan kembali.⁸⁷

Para ulama yang telah melaporkan diri kepada penguasa militer Belanda, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Komando Markas gerilya Aceh, mengambil langkah-langkah pada tahun 1903 untuk membangun kembali *dayah-dayah* yang selama ini mereka tinggalkan.⁸⁸ Sejak waktu itulah istilah *dayah*

⁸⁶ *Ibid.*, h. 84.

⁸⁷ Hasjimy, *Bunga Rampai*, h. 85.

⁸⁸ *Ibid.*

kadang-kadang dipergunakan juga seperti yang diistilah di pulau Jawa, yaitu *Pesantren*. Bahkan di Aceh Barat dan Selatan istilah ini lebih populer disebutkan, jika dibandingkan dengan sebutan *dayah*.⁸⁹

Adapun *dayah-dayah* yang didirikan atau dibangun kembali pada pertengahan pertama abad 20, antara lain di Aceh Besar: *dayah* Tanoh Abee, *dayah* Lam Birah oleh Teungku H. Abbas, sementara adiknya Teungku H. Jakfar mendirikan *dayah* Jeureula, selanjutnya *dayah* Lam Nyong, *dayah* Lam U, *dayah* La Bhuk, *dayah* Ulee Susu, *dayah* Indrapuri didirikan oleh Teungku Chiek Indrapuri, *dayah* Lam Seunong oleh Teungku Chiek Lam Seunong, *dayah* Ulee U oleh Teungku Chiek. Ulee U, *dayah* Krueng Kalee, *dayah* Montasik, *dayah* Piyeung, *dayah* Lam Sie dan masih banyak lagi. Sedang Teungku Fakinah, seorang pejuang wanita, setelah menghentikan perjuangannya pada tahun 1910, mendirikan *dayah* Lam Diran sebagai kelanjutan *dayah* neneknya di Lam Krak dan di La Pucok. Suatu keistimewaan dari *dayah* ini adalah pada santri wanita selain diajarkan ilmu agama juga diajarkan berbagai jenis ketrampilan; seperti menjahit, menyulam dan sebagainya.⁹⁰

Di daerah Aceh Pidie dibangun kembali atau didirikan *dayah-dayah* antara lain: *dayah* Tiro, *dayah* Pantee Geulima, *dayah* Cot Plieng, *dayah* Blang, *dayah* Ie Lampoh Raya, *dayah* Garot, Gampong Aree, *Dayah* Ie Leubeu yang didirikan oleh Teungku Muhammad Arsyad (Teungku Chiek Di Yan. *Dayah* Meunasah Raya oleh Teungku Muhammad Yusuf (Teungku Chiek Geulumpang Minyeuk) dan *dayah* Teupin Raya yang didirikan oleh Teungku Chiek Teupin Raya;⁹¹ sementara di Aceh Utara, antara lain: *dayah* Tanjungan, *dayah* Mesjid Raya, *dayah* Kuta Blang, *dayah* Blang Bladeh, *dayah* Cot Meurak, *dayah* Juli, *dayah* Pulo Kiton yang didirikan oleh Teungku Pulo Kiton dan masih banyak lagi.⁹²

⁸⁹ Wibowo, *Pendidikan*, h. 44-45.

⁹⁰ Lihat Ali Hasjimy, "Srikandi Teungku Fakinah" *Atjeh, Sinar Darussalam*, Nomor 63 h. 66, Pebruari, 1976, h. 19. Lihat juga: H.M. Zainuddin, *Srikandi Atjeh* (Medan: Iskandar Muda, 1965), h. 29.

⁹¹ Ali Hasjimy, "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah" *Sinar Darussalam*, Nomor 63, Agustus/September, 1975, h. 23-24.

⁹² *Ibid.*, h. 24.

Di daerah Aceh Barat, selain dibangun kembali *dayah* Rupert oleh keturunan Teungku Chik Muhammad Yusuf, pada perempat pertama abad 20 juga didirikan beberapa *dayah* lain. Di antaranya, yaitu *dayah* Ujung Kalak dan *dayah* Blang Meulaboh, *dayah* Paya Lumpai Satiga dipimpin oleh Teungku Syekh Abu Bakar. Sebelum membangun *dayah* ini Syekh Abu Bakar memperoleh pendidikan di *dayah* Lam Bhuk, Aceh Besar. Jumlah santri pada masing-masing *dayah* tersebut dalam ukuran puluhan orang. Selain itu di Kuala Bhee Woyla terdapat juga *dayah* di bawah pimpinan Teungku Ahmad, demikian juga di Peureumbeu di bawah pimpinan Teungku Di Tuwi. Pesantren ini juga menampung santri dalam jumlah puluhan orang.⁹³

Di Daerah Aceh Selatan, sejak perempat pertama abad ke-20 juga berdiri beberapa *dayah*. Di antaranya, *dayah* Teungku Syekh Mud di Blang Pidie. Teungku Syekh Mud memperoleh pendidikan di *dayah* Lara Bhuk dan *dayah* Indapuri, Aceh Besar. Setelah kemerdekaan *dayah* Teungku Syekh Mud itu bernama *dayah* Bustanul Huda. Di Suak Samadua berdiri pula *dayah* dengan nama Islahul Umam di bawah pimpinan Teungku Abu dan Teungku M. Yasin. Di Terbangun berdiri *dayah* Al-Muslim di bawah pimpinan Teungku H. Ali. Di Tapaktuan berdiri *dayah* Al-Khairiyah di bawah pimpinan Teungku Zamzami Yahya dan di Labuhan Haji berdiri *dayah* yang juga disebut Al-Khairiyah di bawah pimpinan Teungku Mohammad Ali Lampisang.⁹⁴

Di daerah Aceh Utara dan Bireuen, sejak perempat pertama abad ke-20 juga berdiri beberapa *dayah*. Di antaranya, *dayah* Ulee Ceue di Samalanga yang didirikan oleh *Teungku Chik* Haji Araby yang lebih dikenal dengan sebutan Teungku di Ulee Ceue, yang pernah puluhan tahun belajar di Mekkah. Kemudian *dayah* Peudada di bawah pimpinan Teungku Chiek Baden. Kemudian juga *dayah* Cot Meurak yang didirikan oleh Teungku Chiek Haji Muhammad Amien yang biasa disebut Teungku di Cot Meurak.⁹⁵ Selanjutnya *dayah* Darul Muttaqin Laga

⁹³ Wibowo, *Pendidikan*, h. 46.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 47.

⁹⁵ Ismuha, *Ringkasan Riwayat Hidup dan Perjuangan Teungku Abdurrahman Muenasah Meucap* (Buku, Tidak diterbitkan, 1949), h.6-7.

Baru Geudong Pasai yang didirikan oleh Teungku di Pasai (Abah Teungku Mahmudi)⁹⁶

Di samping lembaga pendidikan Islam berupa *dayah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah didirikan kembali oleh para ulama, di Aceh juga telah diperkenalkan pendidikan Belanda pada tahun 1907, Sebagai akibat dari proses politik, jika dibandingkan dengan daerah lain, maka Aceh termasuk terlambat menerima sistem pendidikan model Barat ini. Pendidikan ini baru diperkenalkan kepada masyarakat Aceh pada awal abad ke-20. Peperangan yang lama dan melelahkan menyebabkan sulitnya mengorganisir sistem pendidikan dengan baik. Di samping itu juga sebagian orang Aceh tidak mau mengikuti pendidikan model Belanda dan mengatakan bahwa lembaga itu sebagai lembaga westernisasi. Slogan ini sebenarnya muncul sebagai refleksi dari sikap anti kolonialisme Belanda yang sangat mengkristal dalam masyarakat Aceh saat itu.⁹⁷

Pengembangan pendidikan model Barat di Aceh, terutama setelah politik etis direalisasikan, pada dasarnya didasari pada pertimbangan ekonomi untuk memperkuat cengkraman kolonialisme dan demi kelangsungan kekuasaan Belanda. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di belakang bahwa pada awal abad ke-20 perusahaan-perusahaan kolonial dan yang berkolaborasi dengan Belanda semakin membutuhkan pekerja-pekerja terampil. Banyak pegawai yang direkrut dari bumi putera dijadikan sebagai aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Untuk kepentingan inilah mereka mengembangkan sistem pendidikan kepada kalangan penduduk bumi putera. Penyelenggaraan sistem pendidikan kolonial di Aceh dilaksanakan penuh dengan diskriminatif, artinya tidak semua masyarakat Aceh mendapat tempat yang sama dalam memperoleh pendidikan Belanda. Hal ini menghasilkan masyarakat berkelas dari generasi ke generasi di Aceh. Pada zaman kolonial strata sosial sengaja dipelihara agar terpecah-pecah dalam golongan-golongan. Menurut hukum Belanda, masyarakat dibagi ke golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi

⁹⁶ Saifullah, *Profil Dayah Darul Muttaqin Laga Baro Samudra Pasai* (Buku, tidak diterbitkan, 1999), h. 23.

⁹⁷ Walidin, *Dinamika*, h.113-114.

Putera. Sedangka menurut status sosial masyarakat dibagi menjadi golongan bangsawan (*aristocrat*), dan pemimpin-pemimpin agama serta adat.⁹⁸

Kalangan ulama dan masyarakat umumnya kurang menaruh perhatian terhadap pendidikan Barat dan bahkan menaruh curiga akan adanya unsur kristenisasi. Sejak saat itu terlihat suatu perkembangan menarik di dunia pendidikan di Aceh. Terdapat dua corak pendidikan yang berpusat di sekolah dan *dayah* yang secara substansial berbeda. Jenis pendidikan *dayah* melahirkan ahli agama yang kurang akrab dengan disiplin ilmu umum dan sekolah melahirkan ahli iptek yang relatif minim, bahkan tidak ada ilmu agama. Tuduhan sekuler terhadap dunia pendidikan Barat dan kolot terhadap dunia pendidikan tradisional awal dari lahirnya dualisme pendidikan.

Sebagai respon terhadap kenyataan ini terlihat adanya inisiatif para ulama merekonstruksi lembaga pendidikan tradisional ke sistem madrasah yang modern. Di sini mulai diperkenalkan cara belajar baru dengan sistem kelas dan menggunakan papan tulis, dengan kurikulum yang seimbang antara ilmu-ilmu agama dan disiplin ilmu umum. Corak madrasah ini pertama kali muncul di Aceh pada tahun 1916. Pendidikan di madrasah diatur berjenjang; pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, 'Aliyah dan al-Jami'ah). Bahkan terdapat pula tingkat taman kanak-kanak disebut dengan *Bustan al-Athfal* atau *Raudhah al-Athfal*. Pada sistem madrasah pula guru-guru mulai diperkenalkan menerima gaji yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.⁹⁹

Corak pendidikan modern ini pertama kali diperkenalkan di Aceh oleh Tuanku Raja Keumala (w. 1930) yang diberi nama dengan Madrasah Khairiah pada tahun 1916 di Kuta Raja (Banda Aceh sekarang).¹⁰⁰ Kemudian dilanjutkan oleh Sayid Husin Syahab warga Negara Indonesia keturunan Arab dengan mendirikan Madarash Ahlisunnah Waljama'ah, pada tahun 1928 di Idi Aceh

⁹⁸ *Ibid.*, 115-117.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 118.

¹⁰⁰ Badruzzaman Ismail, *Peranan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama di Aceh* (Banda Aceh: Gua Hira', 1995), h. 157.

Timur.¹⁰¹ Inilah kondisi intelektual di Aceh menjelang didirikannya Jami'ah Almuslim pada tahun 1929.

D. Kondisi Politik

Dunia Islam, sejak abad ke-18 telah jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Pemerintahan di negara-negara Islam yang masih hidup, makin lama makin lemah. Turki yang sejak tahun 1294 menganggap dirinya sebagai sentral kekuatan politik Islam, sejak tahun 1685 terus menerus melunjur ke bawah.¹⁰² Mesir sejak awal abad ke 16-19 adalah *vazal* Turki. Di bidang kebudayaan dan agama, Mesir merupakan pewaris dari kemegahan Damasyik, Bahgdad, Cordova dan Mameluk. Setelah dibukanya *Terusan Suez* pada tahun 1869, wajah Mesir mulai berubah. Perancis mulai memainkan perannya di wilayah sungai Nil itu. Mesir yang dilanda krisis keuangan terpaksa menjual saham kepemilikannya pada Serikat *Terusan Suez* kepada Inggris, dan sejak itu dua kekuatan imperialis (Perancis dan Inggris) berperan di negara Piramid itu.¹⁰³ Untuk menjamin modal Inggris dalam Serikat *Terusan Suez*, maka Inggris menempatkan pasukannya di Mesir dan sejak itu Inggris mulai melakukan operasi militer di Mesir. Sejak itu Mesir dapat dikuasai oleh Inggris, meskipun secara yuridis masih bernaung di bawah kekuasaan Turki. Di sisi lain, di dalam negerinya sendiri, Mesir pada abad ke-18 terjadi perbedaan yang sangat tajam antara kelompok elit penguasa (Mameluk) dan rakyat. Para mamluk berasal dari Kaukasus dan Armenia di Asia

¹⁰¹ Ibrahimy, *Sekitar*, h. 93-94.

¹⁰² Tiga abad setelah hijriyah, sejarah Timur Tengah lebih ditentukan oleh orang-orang Turki daripada orang Arab. Mereka berperang, teguh pada keyakinan dalam membela agama Islam dan menjayakannya. Pada tahun 1453, Negara Turki mampu merebut Konstantinopel. Sultan yang bergelar Kalifah dianggap sebagai pimpinan umat Islam sedunia. Gereja Aya Sophia dijadikan mesjid. Hasan basri Cantay dalam mengagumi kebesaran Turki menyatakan: Jika bukan karena bangsa Turki, sudah lama dunia Arab menjadi jajahan komonis. Islam kerena ia didirikan oleh Allah, bukan milik orang Arab dan Turki saja. Sepanjang sejarah, bangsa Turki hanya berusaha melayani agama pemberian Allah itu. Bahkan dengan korban sebanyak-banyaknya jika perlu. Matahari alam memancar mula-mula di cakrawala Arabia tetapi ia menjumpai hati yang lebih terbuka akan sirnanya yang mulia dan menghidupkan itu di Turkistan. Segera setelah bangsa Turki menginsafi hakikat Islam, mereka terus memeluknya dan mereka menjadi pendukung dan pembelanya, telah 12 abad hingga sekarang. Islam telah menjadi agama yang wajar dan benar bagi mereka seperti halnya bagi seluruh umat manusia yang ikhlas mencintai kebenaran. Lihat: K.W. Morgan (*ed.*), *Islam Jalan Mutlak*, Jilid-II (Jakarta: PT. Pembangunan, 1963), h. 34.

¹⁰³ Nur el Ibrahimy, *Catur Politik Imperialis di Negara-Negara Timur Tengah* (Bandung:, Al-Maarif, t.t.), h. 35.

Tengah, karenanya secara etnis dan linguistik berbeda dari penduduk Mesir. Perbedaan ini menghasilkan satu pola hubungan dan interaksi tertentu yang tidak selalu harmonis. Lebih jauh perebutan kekuasaan antar berbagai faksi dalam kelompok elit ini menciptakan ketidak stabilan sosial politik,¹⁰⁴ Karena itu pada saat Belanda menyerang Aceh, tidak ada bantuan yang dapat diharapkan dari Turki.¹⁰⁵ Wilayah Islam lainnya juga sedang terdesak. Pada abad ke-19, umat Islam di India dilumpuhkan oleh Inggris. Pertengkaran antar umat Islam dan penganut Hindu bertambah tajam dan memudahkan Inggris untuk memerintah. Negara Iran sebagai salah satu negara sisa kemaharajaan Persia pada abad ke-19 sedang menjadi bahan perselisihan antara Inggris yang mendesak dari wilayah India di Selatan dan Rusia yang menyerang dari Utara. Aljazair sejak tahun 1860 telah ditelan oleh Perancis setelah pertempuran dahsyat pada tahun 1830, berikut Tunisia pada tahun 1850, dan akhirnya Maroko pada awal abad ke-20. Itali giliran menguasai Libya.¹⁰⁶

Setting sosial politik dunia Islam pada abad tersebut benar-benar mengerikan, sebagaimana dikomentari oleh Syâfiq A. Mughni bahwa pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki dan Australia. Setelah itu Inggris menaklukkan Palestina, Syria dan Irâq, sedangkan kekuatan gabungan mengambil alih kontrol atas kota Istanbul. Inggris dan Perancis sepakat untuk membagi Timur Tengah menjadi beberapa negara, termasuk Libanon dan Syria yang berada di bawah pengaruh Perancis dan Palestina, Yordania dan Iraq di bawah pengaruh Inggris. Itali menguasai Anatolia Barat Daya, Yunani menguasai Thrace, Izmir dan kepulauan Aegea. Armenia menjadi negara merdeka dan Kurdistan menjadi provinsi yang merdeka. Sekitar tahun 1912 dan 1920, kerajaan Turki Usmani kehilangan kesuluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balkan. Negara-negara baru muncul di wilayah Libanon, Syria, Palestina, Transjordan dan Iraq. Mesir menjadi negara protektoral

¹⁰⁴ Hasan Asari, *Modernisasi Islam; Tokoh, Gagasan dan Gerakan*, cet. 2 (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 50. Baca juga Hasan Asari, *Menguak Sejarah Mencari Ibrah*, cet. 1 (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 258.

¹⁰⁵ Mulyana, *Perang*, h. 165.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 166.

Inggris, dan bebas secara total dari kekuasaan Turki Usmani. Proses politik yang terjadi semenjak dua abad yang lalu, yaitu proses reduksi dan partisi kerajaan Turki Usmani, mencapai pengertian yang sebenarnya dengan muncul sistem baru negara-negara kebangsaan.¹⁰⁷

Tanpa adanya persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam sedunia, tidak mudah bagi negara Islam dalam menghadapi *imperialisme* Barat. Dengan kekuatan yang sederhana, adalah hal yang tidak mudah untuk mampu menghadapi kekuatan senjata yang modern. Pada saat kemunduran Islam yang sangat dalam itu, Belanda melakukan agresi militernya terhadap Aceh (1873-1912) dan Aceh berjuang sendiri dalam mempertahankan kemerdekaan yang dirampas oleh Belanda. Awal abad ke-19 disebut sebagai abad muram Kerajaan Aceh. Perebutan kekuasaan dalam abad ini sering kali terjadi. Kerajaan dan sultan menjadi kurang berwibawa dan tidak dapat menguasai situasi yang buruk dalam mengendalikan pemerintahan. Suasana kacau yang terlihat di *gampong-gampong*, mengakibatkan kemunduran di berbagai bidang. Kondisi tersebut membuat tempat ibadah dan lembaga pendidikan menjadi tidak bergairah, rakyat menjadi takut untuk keluar rumah terutama pada malam hari, sehingga membuat mereka menjadi lebih menderita. Pada tahun 1803-1830, Sultan Alauddin Jauhar Alam memerintah di kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, terjadi kekacauan di daerah Manggeng dan Singkil. Untuk menyelesaikannya, sultan sendiri yang datang turun tangan.¹⁰⁸ Ketika Sultan Jauhar Alam kembali ke ibu kota, Panglima-panglima *Sagoe* telah mengangkat Saiful Alam menjadi Sultan Aceh. Saiful Alam adalah putra Said Husain, seorang bangsawan Arab yang lahir di Aceh. Pengangkatan ini dipelopori oleh Panglima Polem. Dalam situasi yang genting, Inggris yang sudah menguasai Penang sejak tahun 1784, memperoleh kesempatan untuk intervensi dalam Kerajaan Aceh. Inggris memberikan jasa baik dengan menempatkan kembali Jauhar Alam ke atas tahta. Padahal, ketika pengangkatan

¹⁰⁷ Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, cet. 1, (Jakarta: Logos, 1997), h. 119.

¹⁰⁸ L. Stoddard, *Dunia baru Islam*, terj. H. Muljadi Djojomartono, dkk., (Jakarta: t.p, 1960), h. 61-62.

Saiful Alam menjadi sultan, Inggris berperan di dalamnya. Bagi Inggris, asalkan menguntungkan, mereka pasti campur tangan dengan mengadakan politik pecah belah. Perjanjian antara Inggris dengan Jauhar Alam pun terjadi di Pidie pada tanggal 22 April 1819, dan dikenal dengan nama Perjanjian Pidie (*Tractat Pidie*). Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Inggris bersahabat dengan Aceh, saling membantu apabila salah satu diserang oleh musuh. Masing-masing pihak tidak akan membantu musuh dari sahabat. Inggris diberikan kebebasan berdagang di seluruh pelabuhan kerajaan Aceh.¹⁰⁹

Di sisi lain, Belanda tidak menghendaki Inggris melindungi Aceh, meskipun Belanda berjanji tidak akan menggantikan kedudukan Inggris di Aceh. Akhirnya sikap saling curiga antara Belanda dan Inggris diselesaikan dalam suatu perjanjian di London pada tanggal 17 Maret 1824, dikenal dengan nama *Tractat London (Treaty of London)*. Dengan adanya perjanjian London ini *Tractat Pidie* harus ditinjau kembali. Karenanya, terlihat bahwa Inggris dan Belanda tetap menginginkan Aceh sebagai suatu kerajaan yang merdeka, tetapi pada hakikatnya keduanya ingin berkuasa di Aceh. Hal ini dapat terbaca dari sikap Belanda. Sejak perjanjian London ditanda tangani, permusuhan antara Aceh dan Belanda menjadi semakin terbuka. Di satu pihak, Belanda mengakui kedaulatan Aceh, namun di pihak lain kapal-kapal perangnya lalu lalang di perairan Aceh dan bila bertemu dengan kapal Aceh maka kapal tersebut akan dibajak. Namun sebaliknya kapal Belanda pun ada yang disita oleh Aceh, karena melanggar perairan Aceh. Demikian juga dengan Inggris dan Amerika Serikat juga mengganggu dan menyergap kapal-kapal Aceh, karena dianggap menghalang-halangi perdagangannya di Meulaboh, sesudah didirikannya kantor dagang Amerika bernama *Firm A. Gardner & Co.*¹¹⁰ Insiden-insiden demikian sering sekali terjadi dalam waktu puluhan tahun setelah perjanjian London ditandatangani. Belanda pada tahun 1871 berhasil membawa Inggris ke Meja perundingan hingga akhirnya tercapailah perjanjian *Traktat Sumatra (Treaty of Sumatra)*. Di *Traktat* ini antara lain dinyatakan, bahwa Belanda bebas untuk memperluas kekuasaannya di seluruh

¹⁰⁹ Mulyana, *Perang*, h. 168.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 169.

pulau Sumatra sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Belanda untuk menghormati kedaulatan kerajaan Aceh sesuai dengan isi Traktat London.¹¹¹

Akibat dari penandatanganan Perjanjian Sumatra, maka pada tanggal 15 Pebruari 1873, Read menyebutkan adanya hubungan rahasia antara Aceh dan Konsul Italia, Racchia, dan Konsul Amerika di Singapura, di mana Aceh meminta bantuan untuk menghadapi serangan Belanda. Hal ini dilaporkan oleh Read kepada pemerintahannya di Batavia dan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda meneruskan laporan ini ke Amterdam. Laporan Read mengenai hubungan Aceh, Italia dan Amerika di Singapura itulah yang merupakan ”*Casus Belli*” Peperangan Aceh.¹¹² Sebagai akibat dari pertemuan rahasia ini Belanda tentu saja melakukan provokasi kembali dengan menuduh Aceh sebagai negara perompak dan ketidakmampuan Aceh menjamin keamanan pelayaran di wilayahnya Kerajaan Aceh.¹¹³

Pada bulan Pebruari itu juga, pemerintah mengadakan sidang khusus yang dipimpin oleh Gubernur Jendral London, bekas menteri jajahan Belanda. Keputusan yang diambil adalah mengirimkan 4 batalion militer ke Aceh untuk memaksa Aceh mengakui kedaulatan Belanda, dan apabila menolak tawaran tersebut berarti perang. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 4 Maret 1873 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan yang dalam konsiderannya menyatakan bahwa Aceh selalu merugikan kepentingan Belanda, meminta bantuan asing untuk melawan Belanda, dan melanggar perjanjian persahabatan tertanggal 30 Maret 1857. Berdasarkan kepentingan ini, maka diputuskan penugasan F.N. Neuwenhuyzen ke Aceh dengan satu intruksi yaitu bila sultan menolak mengakui kedaulatan Belanda, maka langsung diumumkan perang terhadap Aceh. Pada tanggal 8 Maret 1873 armada kapal perang Belanda

¹¹¹ Alfian, *Wajah*, h. 75.

¹¹² Antony Reid, *The Contest For North Sumatra* (New York: Oxford University Press New, 1969), h. 93. Lihat juga: B.H.M. Vlekke, *Nusantara Impor Par* (Jakarta: PT. Soeroengan, 1961), h. 319-320.

¹¹³ H.M. Tiro, *Prang Aceh* (Jogyakarta: Pustaka Tiro, t.t.), h. 16 dan 18.

berangkat ke Aceh untuk memaksa Aceh mengakui kedaulatan Belanda, baik secara damai maupun melalui perang.¹¹⁴

Genderang perang dimulai ketika armada Belanda di bawah pimpinan Edelaar Neuwenhuyzen tiba di pelabuhan Kerajaan Aceh pada tanggal 23 Maret 1873 dengan membawa 3.200 serdadu, 168 perwira yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R. Kohler. Aceh bersikap *defentif* karena kekuatan armada laut Aceh sudah jauh berkurang. Lalu Neuwenhuyzen mengirim sepucuk surat kepada sultan Aceh yang isinya mengharap agar sultan Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda. Menanggapi surat tersebut sultan dengan stafnya mengadakan rapat kilat. Teuku Imuem Lueng Bata dalam sidang mengatakan tidak ada kompromi dengan Belanda, ”*Kalau ia panjang kita cencang tiga, kalau ia pendek kita potong dua*”. Karenanya diambil keputusan untuk menolak maksud isi surat tersebut. Setelah Neuwenhuyzen menerima balasan dari sultan Aceh yang menyatakan bahwa permintaannya ditolak, maka pada tanggal 26 Maret 1873, atas nama Pemerintah Belanda mengumumkan ultimatum pernyataan perang kepada Kerajaan Aceh.¹¹⁵ Kerajaan Aceh pada ketika itu di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Syah II (w. 1874).¹¹⁶

Setelah berlangsungnya peperangan selama 18 hari, pada tanggal 23 April 1873, seluruh kekuatan Belanda dapat disapu bersih dari daratan Aceh. Salah satu aib yang tak terlupakan oleh Belanda adalah tewasnya Jendral Kohler yang disambar peluru Aceh. Dengan tewasnya Kohler, semangat serdadu Belanda menjadi surut, sedangkan di pihak Aceh semangat juang semakin menyala, terlebih saat menyaksikan terbakarnya Masjid Raya Baiturrahman akibat ulah Belanda. Dibakarnya mesjid oleh Belanda menimbulkan keyakinan pada rakyat Aceh bahwa Belanda bukan hanya datang sebagai *imperialis* politik yang ingin menghancurkan kemerdekaan Aceh, tapi juga sebagai *imperialis* agama yang akan menghancurkan Islam yang telah mendarah daging pada rakyat Aceh. Angkatan perang Belanda yang gagal menaklukkan Aceh kembali ke Batavia untuk

¹¹⁴ Mulyana, *Perang*, h. 175.

¹¹⁵ Ismail Ya'kub, *Teuku Chik Ditiro*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), h. 15-16.

¹¹⁶ Mulyana, *Perang*, h. 176.

melaporkan kekalahan yang dialami kepada Gubernur Jendral mereka. Kekalahan serdadu Belanda tersebut antara lain kerana tidak mau merenungkan nasehat seorang diplomat Inggris, Raffles, agar Belanda tidak mengganggu Aceh, karena Aceh merupakan "*Umpung Geumeutoe*".¹¹⁷ Belanda belum pernah gagal menyerang daerah lain di Indonesia dengan kekuatan yang sama seperti pada saat menyerang Aceh, dan ternyata Belanda mengalami kekalahan pahit seperti yang dialami pada tahun 1873 di Aceh.

Untuk menebus kekalahan yang dialami, maka Belanda mendatangkan ekspedisi kedua ke Pelabuhan Aceh pada tanggal 20 Nopember 1873, dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pimpinan ekspedisi kedua adalah Jendral Van Swiete, seorang Jendral tua yang mempunyai pengalaman dan telah banyak mengetahui seluk-beluk tentang Aceh. Pemerintah Belanda pun masih menambah dua Jendral lagi, yaitu Jendral Verpijk dan Jendral Pell untuk membantu Jendral Van Swiete. Di samping itu ikut serta Kolonel Wiggers Van Kerohen, Kolonel van Daalen, Letnan Kolonel Van der Heijden dan beberapa perwira menengah lainnya. Seluruh kekuatan Belanda terdiri dari 815 serdadu, 389 perwira, 315 kuda, 234 pelacur, 1.037 jongos, 3.280 kuli, 33 pegawai sipil dan juga bom yang berisi kuman wabah kolera.¹¹⁸

Sebelum armada Belanda mendarat, kembali Van Swieten menulis sepucuk surat kepada sultan Aceh agar mau mengakui kedaulatan Belanda, jika tidak ingin negerinya dihancurkan. Dalam surat tersebut digambarkan tentang kemampuan Belanda yang telah menaklukkan beberapa wilayah Nusantara lainnya, namun ternyata sultan tidak memperdulikan surat tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Desember 1873, mendaratlah serdadu Belanda di Ujung Batee Krueng Raya. Setelah bertempur selama satu bulan, Belanda berhasil menuju ke tempat mesjid raya yang telah terbakar. Pada tanggal 12 Januari 1874, Belanda berhasil merebut Kota Gunongan yang jaraknya 100 meter dari kerajaan, yang berarti Belanda baru berhasil maju sepanjang 750 meter setelah bertarung selama seminggu. Setelah berperang 12 hari berikutnya baru Belanda berhasil merebut

¹¹⁷ Mohd. Said, *Atjeh Sepanjang Abad* (Medan: Pengarang, 1961), h. 378.

¹¹⁸ Said, *Atjeh*, h. 439. Lihat Juga: Ya'kob, *Teungku*, h. 18.

kerajaan pada tanggal 24 Januari 1874. Namun pada saat kerajaan direbut, sultan bersama staf pemerintahan lainnya telah hijrah ke Lueng Bata dan selanjutnya ke Pagar Ayer. Di sinilah Sultan Mahmud Syah II meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1874, kemudian sultan Aceh digantikan oleh Sultan Muhammad Daud Syah II yang berumur hanya 9 tahun, merupakan cucu dari sultan Ibrahim Mansur Syah. Karena Kerajaan sudah dikuasai Belanda, maka pada tahun 1879 kerajaan Aceh dipindahkan ke Kuemala yang ibu kotanya dinamai dengan *Kuta Keumala Dalam*.

Dalam masa empat tahun (1873-1877) ekspedisi Belanda ke Aceh sudah lima Jendral yang digantikan, baik karena tewas maupun dipecat dan dimutasikan yaitu: Jendral Kohler (tewas), digantikan oleh Jendral Van Swiete, digantikan oleh Jendral Pell (tewas), digantikan oleh Jendral Mayor Wiggers Van Kerchem (dipecat), digantikan oleh Jendral Diamond, digantikan oleh Jendral Karel Van Der Heijden. Seringnya pergantian pimpinan ini menggambarkan kepanikan pemerintah Belanda dalam menunjuk seseorang menjadi gubernur Sipil dan Militer di Aceh. Waktu Jenderal Karel Van Der Heijden memangku jabatan tahun 1877, kekuatan serdadu Belanda di Aceh berjumlah 11.000 orang dan daerah yang dikuasai baru 30 km² setelah bertempur selama lima tahun.¹¹⁹

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Jendral Karel Van Der Heijden, yang pernah menjadi personil pasukan inti dalam pasukan Napoleon Bonaparte (1769-1821) ketika melakukan ekspedisi ke Mesir pada tahun 1798, adalah memperketat "*Tutup Larang*", yakni model politik *Kontinental Stelsel* yang pernah dilakukan Napoleon Bonaparte di Mesir. Semua pelabuhan Aceh ditutup, kecuali Ulee Lheue dan Idi. Akibat dari *dekrit* ini, Heijden mendapat kecaman dari Inggris dan pedagang internasional lainnya, sehingga *dekrit* Heijden ini terpaksa dicabut pada tahun 1878. Jika saja *dekrit* Heijden ini tidak dicabut, maka cukup sulit bagi Aceh untuk memasok senjatanya dari luar negeri. Dengan dicabutnya *dekrit* tersebut, Aceh agak sedikit leluasa dalam menambah amunisi perang. Karena *dekrit*-nya dikritik oleh internasional, maka Karel Van Der

¹¹⁹ Tiro, *Prang*, h. 22.

Heijden mengubah haluan perangnya dengan politik membabi buta Belanda dan kejam seperti penyerbuan bangsa Hun di Eropa (*Hunnent Tocht*) yang akan membunuh siapa saja yang ditemui termasuk anak-anak dan wanita, ulama, dan santri yang tidak ikut berperang serta membakar *dayah-dayah* dan tempat ibadah lainnya.¹²⁰ Akibat dari kebijakan politik membabi buta dan kejam yang dilancarkan oleh Karel Van Der Heijden membuat gerah kaum ulama.

Atas dasar itu pada waktu Jendral Pruijs Van Der Hoeven sebagai gubernur Sipil dan Militer menggantikan Karel Van Der Heijden di Aceh para ulama ikut lebih aktif dalam peperangan *jihâd fi sabilillâh* melawan *kâfir al-harb* Belanda. Teungku Chik Pantee Geulima (w. 1904) seorang pimpinan *dayah* di Meureudu Pidie telah merubah fungsi *dayah*-nya dari tempat pendidikan menjadikan tempat pelatihan prajurit. Sekitar 1.000 santri berubah menjadi prajurit pejuang yang maju ke medan perang di Aceh Besar dengan membangun Kuta di sebelah Krueng Daroy. Pada tahun 1877-1878 Teungku Chik Pantee Geulima memimpin 400 prajurit untuk melakukan koordinasi dengan Sisingamangaraja XII¹²¹ di Batak dan Karo untuk persiapan perang melawan Belanda (1878). Teungku Chik sendiri berada di sana selama enam bulan, ketika kembali ke Aceh 100 prajurit termasuk beberapa panglima ditinggalkan.

Akibat dari penekanan yang terus menerus dilakukan Aceh terhadap Belanda, Gubernur Van Der Hoeven merasa tidak mampu mengatasinya, sehingga ia digantikan oleh Jendral Laging Tobias pada tahun 1883. Menurut Tobias, suasana di Aceh sangat buruk hampir tidak ada harapan dan pihak Belanda harus bersatu dalam benteng yang kuat.¹²² Gubernur Belanda silih berganti di Aceh,¹²³

¹²⁰ Mulyana, *Perang*, h. 182.

¹²¹ Terdapat isu bahwa Sisingamangaraja XII ini telah memeluk agama Islam sebelum meninggal. Lihat: Mulyana, *Perang*, h. 184.

¹²² Ya'kub, *Wajah*, h. 61.

¹²³ Selama 12 (duabelas) tahun Belanda melakukan *ekspedisi* ke Aceh sudah 15 Jendral telah di datangkan sebagai Gubernur Sipil dan Militer di Aceh yaitu: 1) Jendral Kohler, 2) Jendral Van Swiete, 3) Jendral Pell, 4) Jendral Mayor Wiggers Van Kerchem, 5) Jendral Diamond, 6) Jendral Karel Van Der Heijden, 7) Jendral Van Der Hoeven, 8) Jendral Laging Tobias, 9) Jendral Demmeni, 10) Jendral Van Teyn, 11) Jendral Pompe, 12) Jendral Deijkerhoff, 13) Jendral Vetter, 14) Jendral Stemfoort dan 15) Jendral Van Vliet. Ini semakin membuktikan betapa paniknya Belanda menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Lihat: Mulyana, *Perang*, h. 190.

namun Aceh tetap tidak bisa dikuasai. Hampir seluruh wilayah yang pernah dikuasai Belanda di Aceh jatuh kembali ke tangan barisan *jihâd fi sabîlillâh* Aceh.

Demikian juga dengan ulama-ulama yang lain seperti Teungku Muhammad Saman yang lebih dikenal dengan Teungku Chik Di Tiro (w. 1891), setelah kembali dari Mekkah langsung memimpin perang bersama sejumlah 6.000 prajurit (santri). Dengan semangat hikayat *Prang Sabi* Teungku Chik Di Tiro tak kenal lelah dalam mempertahankan Aceh dari jajahan Belanda sampai tahun 1891. Ketika Teungku Chik Di Tiro mencapai keberhasilan di Aceh Besar, Teuku Umar kembali ke Aceh Barat untuk menghidupkan perlawanan di sana. Akibatnya medan pertempuran yang dihadapi Belanda bertambah luas. Hal ini menimbulkan kepanikan di pihak Belanda. Demikian juga dengan Teuku Umar (w. 1899) dan Isterinya Cut Nyak Dhin (w. 1909) di Wilayah Aceh Barat, Panglima Nyak Makam (w. 1896) dari Aceh Timur dan Langkat terus memberikan perlawanan kepada Belanda. Setelah berhasil merebut kembali Idi dari tangan Belanda, kemudian ia kembali ke Aceh Besar pada tahun 1893 untuk membantu Teungku Chik Muhammad Amin Tiro (Putra Teungku Chik Di Tiro yang menggantikan ayahnya yang meninggal tahun 1891) dalam melawan penjajah Belanda.¹²⁴

Setelah Belanda mengalami kegagalan demi kegagalan dalam peperangan di Aceh sejak tahun 1873 sampai dengan 1890, maka pada tahun 1891 diangkatlah C. Snouck Hurgronje (1857-1936) seorang orientalis kenamaan sebagai penasehat Pemerintah Hindia Belanda di Aceh. Setelah konsep penaklukan selesai dirumuskan, maka C. Snouck Hurgronje meminta agar konsep penaklukan Aceh tersebut segera direalisasi di lapangan, maka perlu seorang Gubernur Sipil dan Militer yang sepaham dengannya. Pada tahun 1898 diangkatlah kembali Van Heutsz sebagai Gubernur dan Panglima, karena ia dianggap telah banyak mempunyai pengalaman tentang Aceh dan konsepnya itu sudah pernah ditulis dalam brosurnya *De Onderwerping Van Atjeh*.¹²⁵

Sejak kepemimpinan Van Heutsz, taktik Belanda menaklukkan Aceh mengaloi perubahan. Taktik kekerasan akan dijalankan sepenuhnya, sesuai dengan

¹²⁴ *Ibid.*, h. 184.

¹²⁵ Antony Reid, *The Contest*, h. 276.

nasehat Snouck Hungronje.¹²⁶ Van Heutsz yang berwatak keras dan sombong, merupakan orang yang sangat tepat bagi Snouck Hungronje untuk menerapkan konsepnya. Van Heutsz menjalankan siasat baru yang tidak lagi mengenal jalan damai. Hal ini mungkin disebabkan pengalaman-pengalaman pahit yang dialami Van Heutsz pada masa sebelumnya di Aceh. Sistem konsentrasi tidak lagi digunakan, benteng-benteng di sekitar Kutaraja dihapuskan, medan perang diperluas ke seluruh wilayah Aceh, daerah pedalaman menjadi sasaran bagi Marsose untuk mengejar gerilyawan. Untuk mengintensifkan gerakannya, Van Heutsz mengeluarkan intruksi untuk segera merebut seluruh Aceh Besar dan kepada tiap-tiap penduduk harus mempunyai kartu penduduk, pejuang yang tidak mau tunduk harus dibinasakan. Kontra gerilya harus diaktifkan, lebih-lebih pada malam hari. Kaki tangan atau *spion* harus dipasang sebanyak-banyaknya. Teuku Umar harus diburu terus. Penduduk dilarang memakai senjata. Tidak ada perdamaian dengan sultan dan pengikutnya. Bila ada penduduk yang bersikap merugikan Belanda, berarti musuh. Penduduk yang membantu Belanda diberi hadiah. *Blokade* pantai tetap dilakukan”.¹²⁷ Pada bulan juni 1898 terjadilah pertempuran dahsyat di Garut. Kekuatan serdadu Belanda terdiri dari 4 batalyon, 10 kali lebih besar dari kekuatan prajurit Aceh dan pipinan langsung oleh Van Heutsz. Memang menghadapi strategi baru dari Van Heutsz, pejuang Aceh banyak yang berpencar ke seluruh wilayah Aceh. Namun demikian rakyat Aceh tak kenal lelah dalam melawan Belanda. Tidak ada cara lain kecuali taktik perang gerilya yang harus diterapkan. Ternyata taktik ini dapat membingungkan pihak Belanda. Pertempuran yang berlangsung pada tahun 1898-1903 adalah pertempuran yang menentukan bagi Belanda untuk dapat terus berkuasa di daerah ini, sedangkan bagi rakyat Aceh adalah suatu pertarungan nyawa, apakah negerinya tetap merdeka atau jatuh di bawah kekuasaan Belanda.¹²⁸

Setelah melakukan evaluasi terhadap situasi dan kondisi yang ada kurang menguntungkan pihak Belanda, maka Gubernur Sipil dan Militer Van Heutsz

¹²⁶ Mulyana, *Perang*, h. 197.

¹²⁷ Said, *Atjeh*, h. 610.

¹²⁸ Mulyana, *Perang*, h. 199.

bersama penasehatnya C. Snouck Hurgronje menerapkan politik lain terhadap Aceh yaitu dengan menculik isteri dan anak-anak elite pejuang. Harga diri orang Aceh mempertimbangkan suatu kondisi berbudi rendah bila merelakan anak dan isterinya diperlakukan semena-mena oleh musuhnya. Ketika Belanda menculik isteri dan anak-anak Teungku Meuntroe Garot, pejuang ini terpaksa menyerahkan diri sebagai tebusan bagi anak-anak dan isterinya. Selain itu, juga ditangkap Pocut Di Rambong dan Cut Manyak, dengan maksud agar suami mereka bersedia menyerahkan diri sebagai tebusan. Begitulah taktik Belanda, menjadikan isteri dan anak-anak pejuang sebagai sandera. Pada bulan Desember 1902, nasib yang sama dialami pula oleh isteri sultan yaitu Pocut Putro dan Pocut Di Murong dengan putranya Tuanku Ibrahim yang baru berusia 14 tahun. Mereka bertiga disekap di Kuta Raja. Penderitaan mereka sebagai tahanan diumumkan secara besar-besaran dan disampaikan kepada sultan. Ternyata umpan yang dilakukan Van Heutsz berhasil dan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah II (w. 1939) ditangkap oleh Belanda pada tanggal 8 Januari 1903 dan diterima oleh Van Heutsz dengan upacara kebesaran di Kuta Raja pada tanggal 15 Januari 1903. Pada bulan September 1903, Panglima Polem, orang kedua pemimpin perjuangan saat itu juga tertangkap setelah ibunya yang sudah lemah dan menderita sakit ditahan dan dijadikan sandera. Kekejian perbuatan Belanda ini tidak terdengar oleh dunia luar karena lihaihnya barisan propaganda mereka. Usaha Belanda agar hubungan antara sultan dan rakyatnya dapat diputuskan, maka sultan kemudian diasingkan ke Batavia. Dari Batavia beliau dibuang ke Ambon, tetapi pada tahun 1907 dibawa kembali ke Batavia hingga meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1939.¹²⁹ Karena sultan sudah tertangkap, maka sebagai imbalan Van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda, sebagai pengganti Gubernur Sipil dan Militer di Aceh ditunjuklah Van Der Wijck pada bulan Mei 1905. Dengan tertangkapnya sultan, peperangan diambil alih sepenuhnya oleh para ulama,¹³⁰ Ulama *dayah* dengan gigih dan tanpa kenal lelah terus melakukan

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 200.

¹³⁰ *Ibid.*

perlawanan walaupun dengan peralatan seadanya. Setelah Sultan ditangkap pada tahun 1903. Belanda mulai berkuasa di Aceh, maka yang masuk ke Aceh bukan saja perangkat-perangkat teknologi kemajuan peradaban Barat, namun juga perangkat-perangkat lunak lainnya ikut masuk, termasuk berbagai macam ideologi dan agama.¹³¹ Komunisme adalah ideologi asing masuk setelah kekalahan definitif Aceh dari Belanda. PKI sangat giat mengganggu keguyuban Aceh yang terkenal dengan tradisi dan nilai-nilai *relegiusitas*. Masuknya komunis ke Aceh sudah tercatat dalam *Mail Rapporten* Nomor 829X/26. Dalam laporan Belanda tahun 1926 gerakan komunis pertama di Aceh terdapat di Gayo Lues.¹³² Karena keadaan politik di Gayo Lues pada masa itu sudah sangat *plural*.

Setelah Belanda berkuasa di Aceh ternyata bukan saja berbagai macam ideologi dan agama asing yang masuk ke Aceh, akan tetapi berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional juga ikut menapakkan kakinya di bumi Aceh. Menurut Ali Hasyimi, salah satu organisasi pergerakan nasional yang sudah masuk Aceh adalah Serikat Islam.¹³³ Sartono Kartodirjo menyebutkan:

Serikat Islam adalah persekutuan yang peranannya sangat penting dalam mendorong proses mobilisasi politik modern pada masyarakat pedesaan. Serikat Islam memberikan para petani petunjuk untuk mengaktualisasikan segala potensi kekuatan melalui ideologi, kepemimpinan, organisasi, dan simbol-simbol.¹³⁴

Kekuatan Islam yang melekat pada Serikat Islam menjadi bagian dari kesadaran umum masyarakat untuk menghilangkan *imege* bahwa mereka adalah kaum yang terbelakang dan tertindas, serta untuk menghilangkan kesan diskriminatif terhadap mereka. Islam hadir sebagai ruh perjuangan sekaligus pengikat yang sangat strategis. Serikat Islam telah berhasil menggerakkan

¹³¹ Salah satu agama yang masuk ke Aceh adalah ajaran Ahmadiyah. Lihat: M. Isa Sulaiman, (*et.al*), *Aceh dan Belanda: Kumpulan Bibliografis* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan, 2003), h. 20.

¹³² *Ibid.*, h. 21.

¹³³ Ali Hasyimi, *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali* (Banda Aceh: Majelis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980), h. 11.

¹³⁴ Sartono Kartodirjo, *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian in The Nineteent Centuries* (London: Oxford University Press, 1973), h. 143.

kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dan menjadikan Islam sebagai simbol nasional. Lebih jauh bahkan Rambe memberikan kesimpulan akan kontribusi Serikat Islam bagi nasionalisme Indonesia:

Dengan memilih Islam sebagai ideologinya, Serikat Islam memastikan diri sebagai sarana yang ampuh dalam cita-citanya menuju emansipasi dan dalam usahanya di sini untuk menarik sebanyak mungkin orang Indonesia dari berbagai kepulauan. Mengingat dia di sini pada tingkat yang cukup tinggi juga berhasil, dapatlah kita menganggap Serikat Islam sebagai gerakan yang telah memberikan kontribusi penting bagi penyatuan Indonesia.¹³⁵

Serikat Islam berdiri dengan tujuan ”berikhtiar mengangkat derajat rakyat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesaran negeri”.¹³⁶ Pertumbuhan Serikat Islam secara meteorik cukup menakutkan pemerintah Hindia Belanda. Daya tariknya menyebar dan menembus batas-batas kelas, baik di kota maupun desa-desa. Pedagang-pedagang Muslim, para pekerja di kota-kota, kiyai/teungku, dan petani dapat ditarik magnet gerakan politik yang sedang dibangun Serikat Islam, sehingga tidak heran kalau pada awal 1912 saja anggota Serikat Islam mencapai 35.000 orang, Desember 1912 anggota Serikat Islam telah meranjak secara drastis mencapai angka 40.000 orang. Kemajuan luar biasa yang dicapai Serikat Islam dari tahun 1219-1916 jumlah anggotanya terus meningkat sampai 490.120 orang. Angka tersebut menjadi demikian fantastis pada tahun 1919 menjadi 2.000.000 orang, suatu jumlah yang belum pernah ada dalam organisasi namapun di Hindia Belanda saat itu. Cabang-cabang Serikat Islam pun terus bertambah dari hanya beberapa saja di tahun 1912, telah menjadi 129 cabang pada tahun 1914 yang tersebar di seluruh Hindia Belanda,¹³⁷ termasuk wilayah Aceh.

Menurut Ali Hasyimi, pada tahun 1914, Serikat Islam resmi berdiri di Aceh. Serikat Islam mendapati Aceh sebagai tempat yang subur untuk perkembangan pergerakannya, karena sebagian besar ulama *dayah* di Aceh

¹³⁵ Safrizal Rambe, *Serikat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942* (Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, 2008), h. 41.

¹³⁶ *Ibid.*, h. 43.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 44.

menerima ide-ide religius yang menjadi ciri khas Serikat Islam.¹³⁸ Pada tahun 1914, ulama Aceh menggelar muktamar Gerilya di tengah rimba pedalaman Aceh. Dalam muktamar tersebut menghasilkan dua hal penting, yaitu *pertama*, perang Aceh akan merubah haluan, dari pola peperangan gerilya, menjadi peperangan dengan penerapan strategi politik perang baru dan *kedua*, menerima Serikat Islam sebagai organisasi politik Islam modern untuk memenuhi strategi politik perang baru tersebut.¹³⁹ Untuk maksud tersebut dipilihlah Kuta Raja sebagai tempat berdirinya Serikat Islam di Aceh dengan Presidennya Teungku Abdul Manaf dengan wakilnya Marah Hoesin Gelar Manggaraja Tagor.¹⁴⁰

Pada tahun 1914, menurut Ali Hasyimi, telah didirikan cabang dan ranting Serikat Islam di seluruh Aceh. Para ulama dan *uleebalang* bersatu padu untuk mengembangkan organisasi ini di seluruh Aceh, termasuk di wilayah Samalanga (Sekarang: Kabupaten Bireuen Aceh) yang dimotori oleh Teungku Syekh Abd. al-Abdul Hamid Samalanga, anak Teungku Haji Malem, seorang ulama besar di Tanjongan Barat Samalanga.

Teungku Syekh Abd al-Abdul Hamid Samalanga sebagai anggota Serikat Islam Aceh terkenal sangat gigih menentang penjajahan kolonial Belanda. Karena pekerjaannya tersebut ia termasuk orang yang paling dicari oleh Belanda pada tahun 1920-an, kerana keterlibatannya dalam organisasi Syarikat Islam, karenanya Beliau melarikan diri dengan menggunakan perahu pukut ke Pulau Pinang pada tahun 1926, setelah mengetahui bahwa kawan-kawannya banyak yang ditangkap oleh Belanda, kemudian meneruskan perjalanannya ke Mekkah.¹⁴¹ Di sana ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh politik yang datang dari berbagai negeri, seperti Mesir, Irak, Turki, Syria, Maroko, Aljazair, Tunisia, India dan negara-

¹³⁸ Ali Hasyimi, *Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali* (Banda Aceh: Majelis Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1980), h. 11.

¹³⁹ Rusdi Sufi dan M. Munir Azis, *Peristiwa PKI di Aceh: Sejarah Kelam Komplik Ideologi di Serambi Makkah* (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2008), h. 28.

¹⁴⁰ Hasyimi, *Perang*, h. 17.

¹⁴¹ Shabri A. Dkk., *Biografi Ulama Aceh Abad XX* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), jil. I, h. 17-20.

negara lainnya. Setelah berada di Makkah selama enam tahun (1926-1932), beliau banyak bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran modern, salah satu di antaranya adalah mengenai sistem pendidikan model sekolah. Mengingat pada era tahun 1920-an di Aceh masih menyelenggarakan pendidikan dengan sistem tradisionil (*dayah salafi*), maka Teungku Syekh Abd. al-Hâmid Samalanga ingin menyampaikan pesan itu ke Aceh, bahwa sudah saatnya sistem pendidikan *dayah* dirubah ke sistem madrasah yang modern. Akan tetapi, karena hal itu akan membahayakan orang yang menerimanya, ia berusaha mencari jalan keluar. Pertama ia memilih orang yang menerima berita tersebut adalah orang yang kira-kira tidak dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, yang dikirim itu bukan surat, melainkan surat kabar bahasa Arab, *Umm al-Qurâ* yang terbit di Mekkah.¹⁴² Dalam celah-celah surat kabar tersebut ia menulis pesan pembaruan pendidikan Islam dengan tulisan Arab. Di antara orang yang dipilih untuk dikirim berita tersebut ialah Teungku Abdullah Ujung Rimba (1907-1983), Teungku Muhammad Daud Bereueh (1896-1987), dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap.¹⁴³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Teungku Syekh Abd. al-Hâmid Samalanga terpaksa harus meninggalkan Aceh berangkat ke Makkah, dikarenakan terlibat dalam gerakan politik Serikat Islam. Di Makkah beliau bersentuhan dengan pemikiran pembaruan. Pemikiran pembaruan tersebut beliau sampaikan ke Aceh melalui surat kabar *Umm al-Qurâ*, yang salah satu penerima pesan tersebut adalah Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Inilah yang mengilhami Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap mendirikan Jami'ah Almuslim pada tahun 1929.

¹⁴² Hasjimy, *Ulama*, h. 74. Ismuha, *Riwayat Ringkas*, h.70.

¹⁴³ Ismail, *Lintasan*, h. 3. Sabri A, dkk., *Biografi*, h. 34.